



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke- : 5 (Lima)  
Jenis Rapat : Raker  
Dengan : Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka. Bappenas,  
Gubernur BI, DK OJK, dan Kepala BPS.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 17 Juni 2019  
Waktu : 13.00 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI  
Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG  
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono  
Acara : Pengambilan Keputusan KEM-PPKF RAPBN 2020  
Hadir Pemerintah : 1. MENTERI KEUANGAN RI/SRI MULYANI  
INDRAWATI, S.E., M.SC., Ph.D;  
2. MENTERI PPN/Ka. BAPPENAS/BAMBANG  
BRODJONEGORO;  
3. GUBERNUR BI/FERRY WARJIYO;  
4. KETUA DK OJK/WIMBOH SANTOSO;  
5. KEPALA BPS/KECUK SUHARYANTO.

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG/F-PG):**

*Salam kebajikan.*

**Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya.**

**Yang terhormat Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya, tadi ada surat dari Pak Bambang agak terlambat karena dipanggil oleh Presiden.**

**Yang terhormat Saudara Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya.**

**Yang terhormat Saudara Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan beserta jajarannya.**

**Yang terhormat Saudara Kepala BPS beserta jajaran.**

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Anggota Komisi XI yang berbahagia.**

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat daftar hadir telah ditandatangani oleh 16 Anggota dari 6 Fraksi dan Ijin 3 Orang. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI ijin kami membuka rapat kerja ini dan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)**

Saudara Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Gubernur BI, Kepala OJK, Kepala BPS dan Bapak Ibu Anggota. Mengawali rapat kerja pada siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, hidayah dan karunianya kita bisa menghadiri rapat kerja pada siang hari ini. Agenda rapat kerja hari ini adalah melanjutkan rapat kerja tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembahasan Asumsi Dasar Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun 2020. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Anggota pada tanggal 13 yang lalu. Kami persilakan kepada pemerintah.

### **MENTERI KEUANGAN:**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

Pimpinan kami akan menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pimpinan maupun Anggota pada tanggal 13 Juni yang lalu. Dan kami akan membuat kategori dari pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kami tidak menjawabnya satu per satu. Pertanyaan yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi dan terobosan-terobosan policy apa yang dilakukan agar kita bisa mencapai pertumbuhan lebih tinggi terutama kita menggunakan angka enam persen agar kita bisa terhindar dari *middle income trap*. Pada dasarnya kami akan menyampaikan ada tiga area dari policy untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu

bagaimana meningkatkan investasi lebih tinggi. Namun disisi lain agar pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan ekstral balance yang bermasalah maka kita juga harus memusatkan perhatian meningkatkan ketahanan dari neraca pembayaran kita dengan memperbaiki defisit transaksi berjalan. Terutama dua hal yaitu ekspor dan substitusi import. Dan didalam konteks inilah kita akan menggunakan instrument APBN tentu didalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari instrument fiskal kita, baik itu dari sisi penerimaan, belanja maupun dari sisi pembiayaan. Itu adalah summarinya untuk bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan enam persen. Kami memberikan ilustrasi sebagai berikut. Kalau kita lihat historis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dilihat dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi. Dari sisi agregat demand kalau kita melihat dari dekade delapan puluhan, sembilan puluhan, dua ribu dan kemudian kita lihat konteks hari ini. Pertumbuhan ekonomi dari sisi agregat demand terutama dari sisi konsumsi pada periode delapan puluhan, sembilan puluhan itu kita bisa melihat gross dari consumption antara 5,6 hingga 5,4.

Sementara sesudah era reformasi dan periode dari 2001 hingga 2018 rata-rata pertumbuhan konsumsi kita itu dibawah 5 persen, yaitu 4,8. Dan tahun 2019 ini kita menggunakan asumsi APBN 5,1 sehingga itu sudah relatif lebih baik dari rata-rata. Namun kalau kita lihat mestinya kita memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi yang merupakan faktor terbesar didalam agregat demand dari GDB kita, yaitu sekitar 56-57 persen. Oleh karena itu didalam KEM-PPKF kami menyampaikan antara 4,9 hingga 5,2 adalah tidak *outlayer* masih didalam kerangka yang kita sebut kemampuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun tentu upsidenya harus dilihat dari sisi sebelah kanan yaitu 5,2 sebagai target konsumsi untuk 2020 dengan rents pertumbuhan 5,3 hingga 5,6. Dari sisi konsumsi pemerintah terlihat bahwa semenjak reformasi pemerintah secara aktif menggunakan instrument fiskal didalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan itu terlihat dari porsinya yang meningkat cukup tinggi. Bedakan dengan angka tahun 1991 hingga 2000 yang hanya 1,1 persen. Sedangkan dari sisi investasi atau pertumbuhan pembentukan modal domestik bruto itu kita pertumbuhan masih relatif dibawah masa tahun delapan puluhan, 8,7. Namun lebih tinggi pada periode tahun 1990 hingga 2000 dimana kalau kita lihat trend dari deindustrialisasi sudah mulai terlihat.

Tahun 2001 semenjak reformasi sebetulnya pertumbuhan investasi cukup tinggi namun tetap tidak di atas tujuh persen. Oleh karena itu kami melihat tahun 2019 dengan target pertumbuhan asumsi 7 persen, dan kita sebetulnya melihat tahun 2018 pada akhir periode sudah mendekati 6,9 namun kita waspada tahun 2019 ini terlihat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlemahan terutama di PMTB. Oleh karena itu untuk KEM-PPKF kami mentargetkan atau dalam hal ini untuk mendukung asumsi 5,3 hingga 5,6 rentsnya adalah pertumbuhan investasi antara 7 hingga 7,4. Untuk ekspor, kalau ekspor kita lihata kinerja dari perekonomian Indonesia memang tidak pernah terlihat cukup tinggi kecuali periode tahun 1991 hingga 2000 yang bisa tumbuh sekitar 8 persen. Artinya ini menggambarkan bahwa kalau kita ingin tumbuh tinggi dengan neraca pembayaran tidak mengalami tekanan maka ekspor menjadi salah satu variabel atau indikator yang perlu untuk didukung. Dan untuk kita lihat tahun 2020 rents antara 5,5 sampai dengan 7 persen itu

sudah merupakan rents yang cukup ambisius, apalagi dengan adanya kondisi perekonomian global yang melemah. Sedangkan import kebutuhan import selalu cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan itu terlihat sangat ajeg dari tahun delapan puluh hingga tahun 2018 ini, pertumbuhannya selalu mendekati 7 persen. Dan oleh karena itu tahun 2020 kita juga melihat trend yang sama. Dari sisi produksi atau agregat suplay kita lihat untuk pertanian grove itu ada di rents 3,8-3,9 adalah termasuk yang tinggi untuk dibandingkan periode empat dekade terakhir. Kalau kita bisa tetap menjaga produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mendekati 4 persen ini merupakan suatu prestasi. Sedangkan pertambangan dan penggalian selalu sangat tergantung kepada gejolak pasar komoditas dunia. Dan oleh karena itu kita meletakkan antara 1,9 dan 2 persen adalah tidak merupakan outlayer dibandingkan trend dari empat dekade terakhir.

Industri pengolahan ini sempat mengalami boom tahun delapan puluh satu hingga sembilan puluh, ini pada saat policy-policy untuk industrialisasi mengalami puncaknya. Namun semenjak itu sembilan satu kesini pertumbuhan dari industri pengolahan tidak pernah mengalami dobel digit, bahkan tidak pernah mengalami di atas 7 persen, sehingga memang ini merupakan bagian yang paling besar PR nya untuk kita bagaimana kita bisa mendukung proses pertumbuhan industri manufaktur. Makanya kami sebutkan didalam fiskal policy kita peningkatan atau penggunaan fiskal policy untuk mendorong inovasi dan produktifitas, karena ini merupakan salah satu element penting didalam menopang pertumbuhan industri pengolahan. Didalam KEM-PPKF 2020 kami menggunakan asumsi pertumbuhan industri manufaktur adalah antara 5 hingga 5,5 persen. Kalau kita lihat komposisi agregat suplay yang lain maka pertumbuhan sektor jasa terutama jasa transportasi itu relatif ajeg cukup tinggi. Sektor jasa keuangan juga relatif cukup ajeg tinggi kecuali tahun sembilan satu dua ribu karena ada krisis ekonomi tahun sembilan tujuh sembilan delapan. Dan untuk 2001-2018 tentu terjadi juga krisis ekonomi global tahun 2008. Dan oleh karena itu didalam dua sektor ini kami meletakkan sesuai dengan trend selama empat dekade. Kecuali untuk informasi dan komunikasi yang memiliki pertumbuhan potensi cukup tinggi dan ini kami letakkan pada antara 7,3 dengan 7,7 sesuai dengan trend dari sektor teknologi komunikasi.

Dari sisi tersebut maka kami juga melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,6 didalam KEM-PPKF menggambarkan seperti yang kami sampaikan pada pidato di Paripurna DPR menggambarkan di satu sisi ada element realistis namun kami juga memasukan element optimisme pada jangkau 5,6 karena kita hanya bicara tentang KEM-PPKF untuk 2020 kami mungkin tidak menyampaikan untuk jangka menengahnya, ya mungkin saya akan menunggu dari teman-teman di Bappenas. Namun konstruksi dari policinya tetap sama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk lebih tinggi tanpa menyebabkan keseimbangan eksternal kita terutama neraca pembayaran menjadi memburuk atau menjadi handicap untuk peningkatan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kalau kita lihat defisit transaksi berjalan didalam dekade-dekade yang lalu maka kita akan melihat bahwa transaksi berjalan menjadi salah satu yang menjadi

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana?

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Untuk yang tadi angka pertumbuhan tadi ada ngga Bu angka untuk realisasi *year today* Bu sampai saat ini.

**MENTERI KEUANGAN:**

Untuk 2019, ada kuartal satu kami ada sudah keluar dari BPS mungkin nanti dari BPS juga 5,07 untuk pertumbuhan Q satunya, ya. Bisa kami teruskan, Pak Andreas?

Untuk transaksi berjalan dilihat didalam konteks hirtoris sekali lagi kita juga menunjukkan bahwa kondisi transaksi berjalan ini kalau kita lihat dinamika dari tahun 1980 terlihat magnitudenya berubah sangat besar terutama pada periode sesudah tahun 2010. Dari sisi magnitude negatifnya yaitu defisitnya ini menggambarkan bahwa kita dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tadi disebutkan komposisi dari sisi produksi kita terutama manufkatur yang pertumbuhannya bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi memberikan konsekwensi bahwa kebutuhan barang-barang untuk pertumbuhan ekonomi berarti berasal dari import itu menyumbangkan salah satu dari penyebab transaksi berjalan. Tentu ada transaksi berjalan yang berasal tidak hanya ekspor minus import tapi juga dari sisi income. Ini yang mungkin menjadi salah satu yang harus kita pikirkan didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperburuk atau meningkatkan funerbilitas dari sisi ekspor kita. Meskipun demikian, walaupun magnitudnya kelihatannya lebih besar Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat, kalau dilihat dari size GDB kita periode defisit transaksi berjalan dibandingkan periode delapan puluh sembilan puluh itu tidak lebih besar dibandingkan terutama diukur dari ratio terhadap GDB yaitu antara 2,7 hingga 2,6 sebelah kiri bawah yang pink namun tentu biasanya memang secara internasional tiga persen dari GDB itu dianggap sebagai suatu apa indikator yang menciptakan funerbilitas lebih tinggi bagi suatu perekonomian apabila defisit transaksi berjalannya mendekati atau di atas tiga persen dari GDB.

Oleh karena itu kita perlu untuk meningkatkan policy-policy didalam rangka mengurangi transaksi berjalan tanpa mengurangi momentum pertumbuhan ekonomi. Point kami adalah beberapa handicap dari pertumbuhan ekonomi kita baik dilihat dari transaksi berjalan maupun nanti kita akan lihat kemampuan kita untuk bisa tumbuh tinggi namun tax rasionya juga harus meningkat ini menjadi suatu hal yang harus tetap dijaga keseimbangannya. Kalau kita lihat penyumbang defisit perdagangan dari sisi *trade acount* maka kita lihat didalam tabel ini, komoditas maupun sub sektor yang merupakan sub sektor defisit. Dan hampir semuanya merah, merah itu

berarti defisit. Hanya sedikit yang merupakan hijau. Ini lagi-lagi menggambarkan pertama yang di atas adalah sektor Migas. Makin tumbuh perekonomian Indonesia makin tinggi permintaan terhadap energi. Dan itu berarti permintaan terhadap minyak dan gas maupun sektor energi yang kemudian derivasinya kepada minyak dan gas menjadi sangat tinggi. Dan kalau kita lihat defisitnya juga makin meningkat. Artinya defisit di sektor energi harus menjadi salah satu perhatian agar kita bisa tumbuh tinggi namun tanpa menimbulkan peningkatan defisit. Yang non minyak non energi juga terlihat industri manufaktur yang kami telah sampaikan tadi dengan pertumbuhan maupun komposisi inport yang cukup besar menggambarkan bahwa PR kita untuk membuat kompetitifnes dan produktifitas sektor industri manufaktur menjadi salah satu masalah yang harus kita perhatikan secara sangat serius. Nah masuk kepada policinya, kalau kami bisa meletakkan secara lebih sederhana dua sisi yang harus di adre seperti yang kami sampaikan dalam pemaparan sebelumnya. Yaitu sisi splai side karena output gap kita sekarang sudah mendekati nol.

Jadi untuk kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sisi suplay atau produktion side harus di adre. Namun harmonisasi dari sisi demandnya juga tetap dijaga, atau momentum dari agregat demand tetap juga harus dijaga. Nah untuk mengadres sisi agregat suplay ini konstrendnya sebetulnya ini berhubungan dengan faktor produksi, yaitu labour (tenaga kerja) capital dan teknologi. Karena tiga ini yang akan mempengaruhi kemampuan kita untuk bisa meningkatkan produktifitas daya saing dan kemudian meningkatkan kapasitas produksinya. Untuk oleh karena itu kenapa pemerintah fokus didalam fiskal instrumennya nanti bicara tentang SDM, termasuk dalam hal ini memperbaiki kualitas SDM didalam rangka memperbaiki kesejahteraan mereka melalui perbaikan upahnya tanpa mengurangi daya kompetisi dan produktifitas. Ini merupakan suatu kombinasi policy yang cukup rumit namun memang itu yang harus dilakukan. Untuk infrastruktur yang merupakan salah satu juga prioritas pemerintah selama lima tahun ini dan masih harus perlu untuk ditingkatkan, namun kita juga harus hati-hati untuk meningkatkan jumlah capital terutama melalu infrastruktur karena Indonesia dikenal merupakan perekonomian yang memiliki aikor tinggi. Itu berarti setiap satu persen grove dibutuhkan capital yang lebih besar. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 4,6 kita 6,3, hampir mirip dengan Vietnam. Satu persen dari pertumbuhan ekonomi berarti membutuhkan enam kali lipat dari capitalnya, hampir sama seperti Vietnam. Malaysia dan Thailand lebih efisien dia hanya membutuhkan 4,6 hingga 4,1. Dan tentu peningkatan sisi produksi adalah tergantung kepada masalah teknologi yang menciptakan inovasi dan produktifitas.

Oleh karena itu nanti akan terlihat tema APBN sangat konsisten dengan kebutuhan kita untuk menyelesaikan atau menangani masalah-masalah struktural disisi suplay sidenya. Sementara dari sisi demand sidenya konsumsi investasi dan eksport kita akan terus melakukan policy yang selama ini memang sudah dilakukan dalam lima tahun yang cukup baik didalam menjaga permintaan konsumsi sekitar lima persen, investasi yang perlu untuk dipacu lebih tinggi dan kami akan menggunakan policy fiskal baik menggunakan insentif dari sisi perpajakan, penggunaan sisi belanja, baik itu untuk belanja KL, infrastruktur dan transfer ke daerah dan dari sisi pembiayaan. Kami juga akan

menggunakan kebijakan koafi fiskal seperti penggunaan *Special Mission Vehicle* yaitu BUMN-BUMN terutama yang dibawah Kementerian Keuangan didalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dari kebijakan fiskal kita. Dan tentu fiskal sendiri tidak akan mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Kebijakan non fiskal seperti kebijakan perdagangan, kebijakan di pasar tenaga kerja, kebijakan pemerintah daerah dan makro ekonomi seperti moneter dan juga stabilitas voting menjadi sangat penting. Di sisi ekspor kita juga akan terus melakukan perbaikan seperti yang kami sampaikan terutama untuk industri manufaktur. Kami menggunakan SMQ seperti LPEI dan juga menggunakan fiskal itu didalam rangka pengembangan promosi pariwisata, dan tentu dengan Bank Indonesia dari sisi moneternya terutama untuk nilai tukar yang bisa mensupport penerimaan devisa lebih tinggi. Terobosan policy dibidang investasi yang kami bisa sampaikan disini adalah baik itu dari sisi belanja pemerintah kami nanti akan sampaikan lebih detail di bagian APBN untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para Anggota. Kami juga menggunakan insentif perpajakan dan kami menggunakan belanja transfer ke daerah untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik. Untuk kebijakan yang kuasi fiskal seperti penggunaan BLU BUMN dan *Special Mission Vehicle*nya Kemenku ini adalah tujuannya secara lebih spesifik mikro sektoral untuk bisa mengedrive isu investasi dan kompetitifnes. Sementara kebijakan non fiskal yang berada didalam domain kementerian lembaga yang lain termasuk Bank Indonesia kementerian yang lain dan dari sisi pemerintah daerah tentu juga sangat penting. Disini kami secara khusus meletakkan pendalaman sektor keuangan yang perlu untuk kita lakukan bersama dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS didalam rangka untuk meningkatkan ketahanan dan kemampuan kita mendukung investasi. Kami membuat kotak sebelah kanan yang kita sebut *hand holding suport*, karena kami menganggap bahwa fiskal tus juga perlu untuk diharmoniskan dan digunakan sebagai insentif bagi daerah didalam meningkatkan kemampuan daerah untuk menarik investasi.

Sehingga ini mungkin nanti kita akan melakukan redesain dari beberapa instrument TKDD kita transfer ke daerah terutama yang berhubungan dengan peningkatan investasi. Untuk pengembangan sektor strategis terutama tadi yang disebutkan yang berorientasi ekspor dasar atau prinsip-prinsip penentuan policinya tentu ini adalah koordinasi dengan kementerian lain terutama Kementerian Industri, Pertanian, Perikanan yaitu bagaimana kita bisa mendisain policy untuk yang memiliki kemampuan untuk menciptakan *multiplayer effec* yang tinggi karena kita tidak hanya melulu melihat grove tapi bagaimana dia bisa memperkuat dampak multiplayer baik itu forward maupun backward linked. Penyerapan imploiment atau dari sisi penyerapan tenaga kerja dan kemampuan untuk menciptakan industri yang berorientasi ekspor atau substitusi inport, serta memanfaatkan revolusi teknologi yang sekarang ini disebut *industry four point o nya*. Dari sisi kebijakan sektor industri yang ada didalam Kementerian Industri kami ingin mendisain fiskal kita secara aktif mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Industri didalam berbagai forum mengenai *industry four point o nya* Indonesia. Sektor-sektor yang ada disini adalah sektor yang sangat sesuai atau mendukung apa yang telah disampaikan di Menko Perekonomian maupun Menteri Perindustrian yaitu seperti industri Petrokimia, industri Logam Dasar, makanan, minuman, karet, tekstil, garmen, otomotif, elektronik dan mesin perlengkapan. Jadi kami

akan lebih menggunakan fiskal sesuai dengan atau tellermate berdasarkan kebutuhan industrinya sesuai dengan strategi industri dari kementerian yang lain. Dan tentu kita juga lihat dari sisi aspek spasialnya. Karena seperti Bappenas waktu kemarin Pak Menteri memberikan juga presentasi mengenai ketimpangan antar wilayah. Bagaimana kita menggunakan fiskal itu untuk secara aktif mengadres isu ketimpangan maupun untuk peningkatan produktifitas.

Nah kami ingin menyampaikan beberapa instrument fiskal yang sudah kita pakai dan akan terus kita kembangkan. Kalau kita menggunakan bansmark karena sering kami ditanya dengan rezim fiskalnya Vietnam yang sekarang ini dianggap berhasil menarik investasi. Maka kami lihat disini untuk Vietnam PPH Badan mereka adalah di 20 persen. Ini termasuk tarif yang rendah di kawasan Asean. Indonesia *one single rate* 25 kecuali yang IPO perusahaan-perusahaan bisa mendapatkan rate 20 persen. Tax holiday Indonesia dalam hal ini sebetulnya sudah cukup progresif karena kami sudah memperpanjang hingga 20 tahun. Kalau di Vietnam dapat diperpanjang hingga 13 tahun sesuai dengan jenis investasinya. Jadi mereka masih bisa memberikan tambahan terhadap apa yang mereka peroleh. Untuk sektor prioritas di Vietnam memprioritaskan hightek, last skill dan yang memiliki dampak sosial yang penting, yaitu bidang pendidikan, vokasi, kesehatan, budaya, olahraga dan lingkungan. Indonesia juga sama, kita menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi sesuai dengan strategi industri dari Kementerian Perindustrian, dan juga untuk mendukung vokasi pendidikan dan produktifitas. Jadi kalau bansmarking Indonesia sebetulnya tidak terlalu berbeda.

Dan untuk daerah-daerah tertinggal di Vietnam mereka menggunakan pemotongan tarif PPHnya 3 persen dibawah tarif biasa yaitu 17 persen. Atau daerah yang sangat tertinggal bahkan menggunakan pemotongan PPH hingga separohnya yaitu 10 persen. Kami untuk hal ini belum memiliki kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang IPO. Oleh karena itu dengan bansmark tersebut kita tentu akan terus harus merifain policy kita agar kita tidak tertinggal dan tidak kalah dari sisi kemampuan menarik investasi dan mendorong eksport. Untuk *curent acount defisit* kami akan terus melakukan berbagai policy sesuai dengan strategi industrialisasi dan untuk sektor-sektor yang menghasilkan devisa, apakah itu pariwisata, perikanan, pertanian maupun sektor industri sendiri. Kami juga menggunakan instrument baik fiskal maupun kuasi fiskal untuk mendorongnya. Ini beberapa contoh mungkin Pimpinan hanya untuk memberikan sedikit tambahan penjelasan karena kemarin banyak pertanyaan dari para Anggota yang spesifik ingin ke mikro bahkan komoditas, dan kami memang menuju kesitu. Namun didalam presentasi kami kemarin untuk Komisi XI karena pada akhir rapat ini yang ingin diperoleh adalah asumsi makronya, rantsnya. Namun untuk mendukung argumentasi didalam forum ini kami akan memberikan contohnya umpamanya untuk beberapa komoditas yang memang sudah dideklarasikan sebagai hal yang potensi seperti Makanan Olahan, Kakao, Alas Kaki, Barang Rajutan, Ikan dan Udang serta Kopi, Teh dan Rempah-Rempah maka kami akan menggunakan instrument fiskal untuk mendukung secara aktif komoditas-komoditas dan industri tersebut, baik yang sifatnya jangka pendek maupun yang jangka menengah seperti kita memperbaiki kompetitifnes dan melalui infrastruktur.

Terakhir untuk memberikan penjelasan mengenai gross saja kemarin



Pimpinan dan meningkatkan acopolocy terobosan yang ditanyakan oleh beberapa dari Anggota Dewan. Kami juga bahkan sudah melakukan suatu study yang sifatnya sangat spesifik, LPEI kita minta bekerjasama dengan sebelas universitas dan sekarang mereka membuat identifikasi baik komiditi dan *suplaychane* dan *by location*. Jadi seperti ini Jawa Tengah yang merupakan beberapa daerah yang merupakan daerah eksportir untuk produk-produk kayu kami sudah mengidentifikasi sampai detail kepada potensi *suplaychanenya* dan kendala baik dari sisi bahan bakunya hingga kepada proses produksi dan penetrasi marketnya. Dan kemudian kita akan mendukung baik LPEI maupun instrument fiskal. Saya juga sudah bicara dengan Pak Wimboh dan Pak Gubernur mungkin kita akan bertiga akan ramai-ramai melakukan pendekatan ke masing-masing daerah dan bahkan sektor sehingga kita bisa bersama-sama menggunakan instrument fiskal, instrument keuangan dan kebijakan moneter dari Pak Gubernur maupun dari Pak Wimboh. Tentu kita juga harus bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait. Itu untuk merespon pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang kemarin dari Pak Sarmuji dari Pak Jhon Erizal, Pak Misbakhun, Pak Hary Purnomo yang semuanya membicarakan mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Pak Johnny Plate dan Pak Andreas yang kami respon secara bersama-sama. Yang kedua topik kedua Pimpinan yang kemarin adalah juga pertanyaan apakah Kementerian Keuangan secara aktif melakukan komunikasi dan edukasi mengenai APBN, kami melakukan. Sekarang setiap bulan kami bahkan mengeluarkan APBN kita sesudah kita menyelesaikan asetlabelity management policy kita yaitu bagaimana kita mereview kinerja dari APBN kita setiap bulannya dan kami juga mengangkat topik-topik tertentu didalam rangka untuk edukasi.

Ini salah satu banyak publikasi yang kita lakukan setiap bulan sekarang dan menyorot beberapa isu APBN. Karena APBN itu menyangkut banyak faktor jadi kami juga perlu untuk terus-menerus melakukan baik itu sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Untuk topik pendapatan negara karena kemarin juga ada pertanyaan mengenai tax ratio dan yang lain-lain kami ingin menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Ini adalah mungkin APBN kita sumary lima tahun terakhir. Dan perkembangan dari sisi pendapatan negara terutama dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBPNya. Kalau Ibu Bapak sekalian lihat kalau untuk penerimaan negara dari sisi perpajakan ada trend yang cukup konsisten tapi kenaikannya tidak meningkat secara drastis. 1.146 untuk tahun 2014 naik ke 1.284 hanya naik sangat sedikit sekitar 44 triliun. Dan kemudian 2017 naik cukup signifikan ke 1.343 dan kemudian naik lagi cukup signifikan di 2018, 1.518 artinya kenaikannya itu cukup tinggi dibandingkan dengan kenaikan tahun 2014, 15 dan 16. Artinya kami melihat ada suatu momentum peningkatan penerimaan perpajakan. Ini yang kami akan terus jaga sambil kami tetap menggunakan instrument fiskal untuk tidak mengurangi iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah mencari keseimbangan atau *fine balance* yang sangat tidak mudah.

Di satu sisi tax ratio ingin ditingkatkan di sisi lain momentum pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta ekspor ingin ditingkatkan. Kalau kita lihat PNBPN terlihat bahkan perkembangan yang bahkan tetennya sangat tidak mudah untuk diprediksi. Kita pernah mencapai hampir 400 triliun tahun 2014, namun kemudian drop ke 255 dan 261 tahun 2015-2016. Ini adalah

tahun yang terberat dari sisi penerimaan negara bukan pajak kita. Dan kemudian mulai agak recover tahun tujuh belas dan delapan belas di 311 dan 409. Untuk 2019 ini kita targetnya adalah 378. Dengan harga minyak dan gas yang merosot kita selalu melihat resiko dari PNBPN selalu sangat nyata. Ada beberapa pertanyaan mengenai tax ratio. Kemarin Pak Misbakhun terutama yang sangat spesifik karena menanyakan beberapa kali versi tax ratio kita revisi terutama pada saat akhir tahun anggaran. Biasanya tanggal 31 Desember kami menyampaikan ke Presiden laporan penutupan tahun yaitu yang tertanggal 31 tapi dikirim tanggal 1 pagi sekali kepada Bapak Presiden dan itulah yang biasanya kita sampaikan ke media mengenai kinerja sementara akhir tahun. Kemudian kami akan melakukan update itu semua GDB nya sementara dan penerimaannya unaudited. Pada saat kami menyampaikan ke BPK yang unaudited kita sudah mendapatkan angka yang relatif sudah ajeg tapi belum diaudit BPK, namun GDB nya belum fix. Baru waktu Pak Kecu nanti menyampaikan GDB akhir tahun itu biasanya bulan Februari ya Pak Kecu, baru kita mendapatkan angka GDB tahun sebelumnya itu plus penerimaan pajaknya. Maka ini yang mungkin menjelaskan kenapa beberapa angka itu kita revisi dari mulai akhir Desember, Februari dan nanti pada saat audited dari BPK.

Namun untuk bisa memberikan penjelasan mengenai tax ratio, di Indonesia ini ada beberapa, ada ratio perpajakan saja yang biasanya kami menghitung penerimaan pajak dan bea cukai terhadap GDB, ini yang disebut ratio perpajakan dalam arti sangat sempit. Tax ratio memasukan penerimaan pajak pusat plus PNBPN SDA Migas dan PNBPN SDA pertambangan umum terhadap GDB. Kalau kita menggunakan benchmark internasional tax ratio biasanya memasukan pajak daerah dan sosial security atau jaminan sosial dalam hal ini BPJS. Kami tidak memasukan dua-duanya pajak daerah dan BPJS atau sosial security itu jaminan sosial kita tidak masukan dalam perhitungan tax ratio. Di banyak di negara-negara terutama yang digunakan OECD itu dimasukan dalam tax ratio. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan inilah yang kita masukan. Ratio perpajakan kita terlihat mengalami tekanan dan kemudian mulai membaik tahun 2000 kelihatan 10,9, 10,8 karena tadi kita lihat penerimaan pajak kita grovenya sangat tipis di tahun 2014, 15, 16. Tujuh belas delapan belas baru mulai meningkat lagi dan sembilan belas kita harapkan momentumnya terjaga, meskipun ini adalah tantangan yang tidak mudah. Dan demikian juga dengan tax ratio kalau kita sudah masukan aspek PNBPN.

**KETUA RAPAT:**

Bu Menteri bisa saya ini Bu.

**MENTERI KEUANGAN:**

Silakan Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Pajak daerah berapa Bu kira-kira yang Ibu ketahui penerimaannya. Terus yang kedua kenapa kita tidak masukan, kalau internasional memasukan

itu kenapa kita tidak, alasannya apa ya.

**MENTERI KEUANGAN:**

Tax daerah pajak daerah itu sekitar dua persen dari GDB. Jadi kalau kita naikan disitu berarti Indonesia tax rasionya 11,4 ya 13,4. Kalau masukan BPJS ya kita naik lebih sedikit lagi. Kenapa kita tidak memasukan itu karena secara tradisional kita memang masukannya tax ratio selalu didefinisikan di nota keuangan itu secara sempit. Kedua kita juga belum mengkonsolidasikan laporan keuangan daerah dalam hal ini, karena kan kita LKPP sendiri. Makanya kalau Pimpinan dan para Anggota Dewan kalau APBN kita itu belanja itu sepertiga ada ke daerah dan itu tidak masukan dalam laporan keuangan makanya nanti laporan keuangan itu kita akan timpang. Dari sisi penerimaan, terus belanjanya yang dilaporkan hanya dua per tiga, karena sepertiganya semuanya di daerah. Makanya nanti kami, bahkan dengan situasi inipun kalau kita laporan keuangan kita masih relatif lebih baik. Namun ini juga merupakan salah satu catatan karena nanti kalau apalagi kalau nanti ngomong tentang hutang kami akan sampaikan sesudah ini. Ini hanya untuk memberikan gambaran kepada kita mengenai pengelolaan keuangan negara dan APBN secara penuh namun ada beberapa catatan yang mungkin tidak secara penuh terlihat dalam indikator-indikator yang kita gunakan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi idealnya mesti dimasukan atau tidak Bu itu pajak daerah.

**MENTERI KEUANGAN:**

Kalau DPR dan Pemerintah sekarang setuju ya kita masukan bisa Bapak supaya juga tidak menimbulkan distorsi dan komparatif secara internasional juga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Namun pada saat yang sama nanti kita juga perlu ada follow up. Seperti tadi laporan keuangan daerah konsolidasinya kepada kita mungkin nanti saya akan konsultasi untuk BPK maupun dengan Pak Wamen sebagai Ketua IAI dan Profesor Akutansi.

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Pimpinan, pimpinan interupsi sebentar ya.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Ibu Menteri, tax ratio ini penting ya, penting untuk edukasi dan pengetahuan publik. Selama ini tax ratio menjadi isu perdebatan yang luan di luar. Ya publik perlu tahu sebetulnya tax ratio kita jika dalam takaran standard diperbandingkan dengan negara-negara lain itu besarnya seperti apa. Sampai

dengan saat ini kesannya tax ratio kita terlalu rendah karena beberapa komponent yang seharusnya berada didalam komponent tax ratio kita memang belum dimasukan. Nah untuk itu saya kira ini perlu ada penjelasan setidaknya ini perlu dikomunikasikan kepada publik ini loh rumusan tax ratio kita ya yang jika diperbandingkan dengan tax ratio negara-negara yang setara dengan kita seberapa besarnya. Setidaknya di atas 13 persen kan ini, setidaknya di atas 13 persen. Tapi selama ini selalu digambarkan seolah-olah sepuluh persen sehingga dia menjadi diskursus yang besar dihadapan publik. Saya kira ini perlu dilakukan apalagi momentum ini momentum yang tepat pada saat kita mempersiapkan asumsi makro dan postur APBN kita nanti.

Terima kasih Pimpinan.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Pak Ketua, ijin Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Andreas, tunggu tunggu.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Jadi memang karena fokus selama ini kita di pembelanjaan kita belum ke penerimaan ya, saya kira memang ini salah satu yang juga menjadi perhatian kita di Komisi XI. Jadi mungkin terminologinya dulu kita samakan Bu. Ini kita sebut ratio perpajakan, penerimaan perpajakan dibagi PDB nominal tidak memasukan PNBPN. Tapi kemudian ada istilah lagi tax ratio, apa bedanya tax ratio dengan ratio perpajakan Bu yang memasukan PNBPN. Jadi ini kadang-kadang memang walaupun saya paham ini antara yang arti sempit dengan arti yang lebar. Tapi mungkin dari istilahnya saja mungkin perlu kita bikin konsensus bersama gitu. Karena kalau ditanya tax ratio itu ya ratio perpajakan, ya kan terjemahannya gitu loh, padahal sama-sama ratio perpajakan yang di atas ya angkanya beda gitu Bu. Jadi mungkin kita perlu samakan juga untuk bikin konsensus yang mungkin ratio perpajakan kurung dalam arti sempit kemudian dalam arti lebar yang memasukan PNBPN, dan bagaimana dengan yang pendapatan daerah. Karena memang disini penting sekali termasuk belanja terhadap belanja sosial atau jaminan sosial.

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi mungkin nanti kita buat satu sesi tersendiri membicarakan tentang tax ratio, supaya ada keputusan politik yang membuat bahwa penerimaan di daerahpun harus masuk dalam tax ratio. Jadi tidak lagi menjadi isu yang diperdebatkan di publik.

Pak Misbakhun.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.  
Pimpinan yang saya hormati, Anggota Komisi XI.  
Ibu Menteri, Gubernur BI, Ketua OJK, Pak Menteri Bappenas dan Kepala BPS  
beserta jajaran yang saya hormati.

**KETUA RAPAT:**

Ini interupsi ya.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Ya interupsi Pak. Ini terkait dengan tax ratio. Saya ingin meneruskan Pak, karena ini adalah berkaitan dengan pertanyaan yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Saya tidak ingin menjadi perdebatannya adalah tadi sampai adalah mau tax ratio kita 13 persen atau 12 persen, 15 persen yang penting keranjangnya itu apa, dan ini harus disepakati bersama. Disepakati bersama, karena apa, ini pertanyaan yang kita pertanyaan orang seringkali abai dan mungkin bagi orang yang tidak mendalami disiplin mengenai pajak pengertian perpajakan dan pajak ini seakan-akan adalah simil, adalah hal yang sama. Ketika orang berbicara tentang pajak dan perpajakan itu adalah dua term yang berbeda. Sama ketika orang berbicara tentang pendapatan negara, berbicara tentang penerimaan negara dan berbicara tentang penerimaan perpajakan dan penerimaan pajak itu sendiri.

**KETUA RAPAT:**

Pak Misbakhun langsung *to the point*.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Ya, saya ingin memastikan Pak bahwa tax ratio kita itu yang disepakati pada saat kita membahas PNBPN, PNBPN Pak mungkin waktu itu Bu Menteri mewakili kepada Pak Hadiyanto selaku itu, bahwa sudah disepakati bahwa PNBPN ini tidak masuk didalam saat kita menghitung PNBPN, menghitung tax ratio. Karena apa, pengertian PNBPN itu penerimaan negara bukan pajak itu adalah penerimaan negara yang sifatnya bukan pajak, sifatnya bukan pajak. Dan kemudian term-term itu masuk didalam pembahasan ini sudah kita sepakati. Ini ada Pak Jhon Erizal, ada Pak Amir Uskara, Pak Johnny Plate dan Pak Andreas yang menjadi saksi pada saat itu bahwa statement itu keluar, dan ditegaskan bahwa penerimaan negara PNBPN ini tidak masuk didalam struktur tax ratio kita. Nah ini Pak Johnny Plate masih ingat. Lah makanya kalau kemudian kita memasukan itu atau kita menyepakati kembali, menyepakati kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua yang masuk dalam basket tax ratio ini apa saja. Ini perlu kita kalibrasi bersama supaya tidak timbul kerancuan pengertian pemahaman tentang tax ratio ini. Dan ini bukan masalah itu diaudit oleh BPK dan sebagainya tidak tapi tatakan hukumnya harus kita rapikan dan kita sepakati apa saja yang masuk. Even kita ngomong tax ratio

kita sepuluh persen tapi kemudian kalau itu tax ratio itu adalah kesepakatan berbeda terminologinya dengan tax ratio Inggris tax ratio Malaysia itu bisa kita klarifikasi dengan baik.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ini digurui kita sama Misbakhun. Ibu silakan Bu.

#### **MENTERI KEUANGAN:**

Iya maksudnya memang yaitu yang disampaikan Pak Misbakhun ya terlepas yang tadi disebutkan saya memahami tuntutan berpikirnya. Kalau berdasarkan undang-undang kita, Undang-Undang APBNnya sendiri secara spesifik disebut perpajakan itu ya hanya pajak dan bea cukai, makanya itu tidak masuk kepada yang lain. Makanya ratio tax ratio itu selalu disebutkan yang disebutkan oleh Pak Andreas dalam arti sempit. Namun kalau kami didalam banyak didalam dunia internasional ditanya kenapa Indonesia kecil banget, kita juga harus menjelaskan bahwa komponent tax ratio yang dihitung di APBN kita adalah dalam arti sempit. Didalam komponent yang biasa digunakan didalam dunia internasional, pungutan dari negara apapun bentuknya dia masuknya sebagai taxis gitu, meskipun namanya adalah tax kita bahkan disebut non tax, tapi itu pungutan oleh negara yang tidak ada ratennya, kan kalau beda dengan BLU yang dimana kalau Anda membeli jasa atau mendapatkan SIM terus bayar itu kita ngga masukan bahkan dalam hal ini.

Tapi kalau Anda membayar tanpa ada raten dari negara secara langsung itu adalah yang disebut sebagai semacam tax resen. Dan kalau di negara lain adalah jaminan sosial itu termasuk dalam kategori karena itu adalah pungutan yang kemudian dibayarnya baru nanti kalau dia lagi pensiun. Nah inilah yang ingin saya sampaikan, tapi semuanya nampaknya sebetulnya sama, Pak Misbakhun, Pak Johnny Plate, Pak Andreas, Pak Melky menginginkan ada definisi, makanya kami sebutkan di sebelah kanan ini. Untuk KEM-PPKF kami tetap menggunakan ratio perpajakan, itu berarti tax ratio dalam arti sempit di 10,6 sampai 11,2. Tax ratio dalam arti yang lebih luas 11,8 hingga 12,8. Ini belum tax ratio yang internationaly banmark, itu saja. Jadi kita ingin menyampaikan yang sama saja. Namun mungkin kalau kemudian kadang-kadang didalam wacana debat publik oh tax ratio harus dinaikan 16 persen. Kalau kita harus meningkat sangat tinggi ya pasti ada konsekwensinya terhadap perekonomian, karena berarti akan ada apa pengambilan dari resources yang ada didalam perekonomian dalam bentuk pajak. Nah namun kami tetap juga sepakat dan sangat menyetujui bahwa upaya perbaikan tax ratio masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kami menyampaikan upaya kami baik yang sifatnya adalah base on peraturan perundang-undangan dimana pada dasarnya basisnya masyarakat itu secara voluntary harusnya melakukan complain terhadap kewajiban perpajakannya. Namun tidak berarti bahwa kami tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, maka kami kepatuhan perpajakan adalah fungsi dari mudahnya membayar pajak. Saya sampai sekarang bilang sama Pak Robet dan timnya saya kepingin bayar pajak itu

lebih mudah dari beli pulsa telpon. Iya kan kalau beli pulsa telpon itu ngga ada semenit kita bisa pakai mobile banking. Harusnya beli pajak lebih mudah lagi.

Karena kalau orang beli pulsa kan butuh pulsanya, kalau orang bayar pajak dia ngga tahu dan oleh karena itu harusnya diberi kemudahan. Makanya reform dibidang administrasi dan proses itu menjadi sangat penting yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman pajak. Bagaimana SPT disederhanakan, bagaimana proses untuk komplain pembayaran dan lain-lain. Di luar itu kami tetap akan juga melakukan enfor komplain terutama untuk pengawasan dan penegakan hukum. Namun ini dilakukan berdasarkan resiko dari penerimaan perpajakan dan profile dari tax buyers kita. Kami hanya ingin mengingatkan karena disini semua Komisi XI adalah yang ikut melahirkan reform perpajakan kita dari tahun 2014 hingga sekarang ini adalah terdiri dari berbagai policy yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat familiar. Dari mulai kita melakukan PPH refaluasi aset tahun 2014, ini jaman Pak Bambang Menteri Keuangannya ada di sebelah saya, reinventing policy, perluasan sistem IT kita menaikkan PPKP kita, kita melakukan tax amnesty tahun 2015.

Tahun 2017 kita menurunkan pajak UMKM, mempercepat restitusi, meningkatkan kepatuhan pasca tax amnesty, complaint risk kita intregus, kemudian implementasi dari AEOI yang sekarang juga sudah mendapatkan informasi yang sangat reguler setahun dua kali dari yuridiksi di luar Indonesia. Dan kami juga tetap menyeimbangkan insentif fiskal tidak melulu hanya untuk penerimaan tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Kami juga semenjat tahun 2017 mengitrujus apa yang disebut joint program. Ini didalam rangka untuk adanya sinergi antar pajak, bea cukai dan bahkan sekarang PNPB dengan adanya Undang-Undang PNPB yang baru. Kita mengitrujus beberapa yang disebut insentif seperti super didaktion untuk vokasi super didaktion untuk riset kemudian tax holiday yang diperluas, tax alowens dan juga untuk perbaikan administrasi didalam rangka tadi untuk mempermudah pembayaran pajak. Di bea cukai kami juga melakukan ekstensifikasi bea cukai terutama untuk cukai kantong plastik. Kami berharap Pimpinan untuk discedulekan konsultasi kami, karena ini sudah masuk dalam Undang-Undang APBN. Kalau boleh ini termasuk yang kita harapkan diprioritaskan. Terobosan dari sisi administrasi perpajakan yang sudah dilakukan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ini adalah tiga hal ini.

Optimalisasi media digital untuk memudahkan pelayanan. Ini yang kita selalu menggunakan E apa Pak Robet, E Filling, E Filling saja gitu yang pakai lagu dangdut itu sangat bagus. Kemudian mobil tax unit kita perbaiki bisnis prosesnya dan juga untuk kontak center. Dan juga kita melakukan untuk penegakan hukum didalam rangka untuk perbaikan complaintses.

Ibu Bapak sekalian Komisi XI yang menjadi partner Kemenku mungkin ini salah satu yang belum kita update, kami itu melakukan sinergi pajak, bea cukai dan PNPB itu sekarang sangat intensif. Ini sudah masuk tahun kedua, dan kita betul-betul monitor per Kanwil dan bahkan ke KPP supaya kita dapat mendapatkan dan dampaknya luar biasa dari tadinya tambahan pendapatan 3 triliun naik menjadi 20 triliun sekarang 30 triliun on top off yang kita lakukan. Dengan mereka bekerja makin rapi ternyata kita mendapatkan lebih bagus. Dan untuk wajib pajak yang baik mereka lebih senang karena mereka ngga lagi

berhadapan dengan pajak bea cukai dengan muka yang berbeda dengan aturan yang berbeda, jadi konsisten. Jadi seperti yang Pak John Erizal kemarin sampaikan untuk yang suda bayar pajak baik kita berikan fasilitas dan pelayanan yang luar biasa bagus. Tapi ini untuk yang di luar kelas, yang masih di luar kelas ya kita mulai masukan. Dan kita bekerjasama dengan para penegak hukum, TNI, Polri, KPK, kita dengan Bank Indonesia, dengan OJK, PPATK, BPKP kita lakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan. Komponen dari joint sinergi ini adalah yang ada di delapan yang delapan komponen ini sangat-sangat sistematis dan betul-betul kita prioritaskan.

Ada analisa bersama, audit bersama, kolektion bersama, investigasi bersama, proses bisnisnya bersama satu single profiling, sekonment. Sekarang itu pajak dan bea cukai sudah saling tukar staff untuk saling memahami. Tadinya dimulai hanya dengan lima orang, sepuluh sekarang lebih dari seratus lima puluh pertukaran staff antar pajak bea cukai. Ini untuk menciptakan satu kontrol penerimaan negara bersama. Dan sekarang dengan Undang-Undang PNBP kami juga sudah masukan DJA yang sebagai pengelola PNBP. Ini mungkin reform yang tidak kami sampaikan secara gembor-gembor keluar tapi itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk, ngga pakai masif Pak ya mungkin mulai masif juga untuk DJP, DJBC dan DJA. Dan kami memang mendapatkan tambahan. Ini didalam kita mendisaint korteknya sudah kita juga sekarang mendisaint antisipasi bagaimana mensinergikan dengan BC maupun apa yang kita sebut dari sisi penerimaan negara bukan pajak. Ini hanya untuk ... semua kegiatan yang betul-betul terstruktur dan fundamental penting untuk penguatan penerimaan negara apapun namanya dia adalah seluruh penerimaan negara meskipun sekarang masih diantara tiga institusi pajak, bea cuka dan PNBP. Kami sebetulnya sudah mendesaintnya seperti penerimaan badan penerimaan negara. Untuk insentif pajak pajak mungkin kami hanya ingin secara cepat saja. Ini adalah yang sudah kita lakukan. Kami untuk yang dibawah lima ratus milyar ada mini tax holiday, tax alowen kita refisi secara lebih mudah. Tax holiday kita lakukan secara sangat simpel dan bahkan juga memperluas termasuk untuk spin off agar FDI bisa masuk.

Jadi eksisting industri kalau dia mau melakukan investasi baru dia bisa aplay untuk tax holiday ini. Dan dengan berbagai fasilitas perpajakan ini mungkin kalau mau bicara tentang tax ratio lagi Pak Johnny Plate, Pak Andreas. Dengan adanya berbagai insentif perpajakan ini sebetulnya renew forgon penerimaan yang tidak kita terima karena kita memberi fasilitas itu sebanyak 150 triliun sendiri, 154 triliun. Itu dalam bentuk PPN, PPNBM, Pajak Penghasilan, Bea dan Cukai. Dan mereka yang mendapatkan benefit dari fasilitas perpajakan yang tidak kita kolek atau yang ditanggung pemerintah itu bermacam-macam dari UMKM yang bisa menikmati 41 triliun sendiri hingga masyarakat umum. Jadi kadang-kadang kalau rumah tangga mengatakan saya dapat apa sebetulnya banyak insentif yang mereka nikmati dalam bentuk pajak yang tidak dibayar karena itu ditanggung pemerintah atau tidak dikolek karena merupakan fasilitas. Itu bisa mencapai hampir 60 triliun sendiri untuk rumah tangga, UMKM 41 triliun tahun 2017, dan untuk badan usaha maupun badan usaha rumah tangga adalah 40 triliun dan 12 triliun. Industri manufaktur bahkan menerimanya relatif sedikit kalau kita lihat di sebelah kanan bawah hanya 12



triliun.

Sementara sektor lain itu mendapatkan fasilitas pembebasan pajak atau pajak ditanggung pemerintah atau pengurangan perpajakan yang cukup bervariasi, dan jumlahnya cukup banyak seperti yang kami sampaikan di tabel sebelah kanan. Pointnya adalah apabila kita tidak memberikan fasilitas perpajakan dan kita kolek secara konsisten ada potensi renews sampai 154 yang seharusnya bisa kita kolek tapi kita tidak kolek. Ini juga untuk bagian dari transparansi dari kita semuanya dan ini nilainya sekitar 1,15 persen dari GDP. Kalau kita mau mengatakan tax ratio itu ya sebetulnya potensi tax ratio yang kita secara sengaja lepaskan didalam rangka untuk memberikan dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Interupsi Pimpinan. Indah di kanan.

**KETUA RAPAT:**

Ibu Indah silakan.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri mumpung tadi bicara tentang pajak. Saya menyampaikan aspirasi dari para pegawai yang menjelang masuk masa pensiun. Untuk PP 68 tentang tarif khususnya pemotongan pajak untuk pensiun itu tahun 2009 itu sampai dengan 500 juta kan potongannya 25 persen mungkin bisa dilakukan review karena saat ini 500 juta itu banyak sekali pegawai yang mendapatkan pensiun dengan nominal seperti itu. Jadi kalau dipotong 25 persen persentasenya sangat besar sekali. Sementara pegawai itu adalah pembayar pajak yang paling patuh karena tidak mungkin bisa menghindar dipotong otomatis oleh kantor.

Pimpinan terima kasih.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Ya yang menjadi pertanyaan, untuk belanja perpajakan ini termasuk sektornya itu ditentukan sebelum APBN atau setelah, karena ini kan merupakan bagian dari kebijakan perpajakan, seperti tadi contohnya

manufaktur ya itu kan masih rendah. Padahal ini sektor yang harus kita naikan tingkatkan. Jadi pertanyaannya adalah untuk transparansi iya bahwa ini diberikan, tapi apakah sebaiknya belanja perpajakan ini juga tidak termasuk didalam pembicaraan di APBN.

Terima kasih.

#### **MENTERI KEUANGAN:**

Didalam peraturan-peraturan perundangan yang melandasinya biasanya adalah dalam bentuk PP itu didalam menimbanginya dimasukan sektor industri tertentu. Jadi kalau untuk tax holiday tax alowens itu memang sudah masuk sektor-sektor yang memang mau dikembangkan terutama manufaktur, namun kita semua tahu untuk PPN mungkin nanti saya bisa ditambah dengan Pak Robet atau Pak Sua. Untuk sektor-sektor lain seperti pertanian atau yang dianggap merupakan penggunaan untuk masyarakat banyak itu kita biasanya atau disebut strategis itu dibebaskan pajak. Dan ini yang kemudian menimbulkan banyak sekali tax revenew kita yang kemudian tererosi oleh berbagai ekseption. Artinya menjawab pertanyaan Pak Andreas ini sudah ditetapkan sebelum APBN. Jadi ini sudah merupakan bagian ekonomi yang memang tidak bisa kita ambil pajaknya karena adanya peraturan tersebut.

#### **F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Pimpinan, artinya kalau ditetapkan pada saat pembicaraan sebelum APBN berarti kan Kementerian Keuangan sudah punya katakanlah anggaran untuk belanjanya kan, dalam pengertian tanda kutip gitu bukan real moneynya tentang berapa banyak yang akan dialokasikan untuk tahun yang berjalan itu, sehingga dengan demikian kita akan melihat perkembangannya didalam programnya ini.

#### **MENTERI KEUANGAN:**

Kami dengan sekarang mencantumkan laporan belanja perpajakan ini, dan ini kita start tahun 2016 yang lalu. Dan ini merupakan salah satu bentuk transparansi yang bahkan untuk level international jarang dilakukan. Jadi kami melakukan ini secara sangat transparan. Tujuannya juga seperti yang Pak Andreas sampaikan. Selama ini banyak fasilitas perpajakan kita tidak sempat lagi lihat apakah dia efektif atau tidak. Nah untuk RAPBN tahun 2020 kami belum bisa melakukan estimasi tapi kira-kira rensnya kita bisa tahu yaitu sekitar 150 triliun itu. Jadi kalau kita bicara tentang berapa belanja perpajakan ya 155 triliun ini yang kita akan bicarakan. Pertanyaan selanjutnya dan ini memang sudah pernah dibicarakan juga dengan Presiden waktu saya melaporkan. Kita juga bisa melakukan stok taking. Kalau Anda punya 150 triliun Anda mau belanjain kemana untuk fasilitas perpajakan ini supaya dampaknya paling besar. Namun ini sensitif secara politik dan sosial, karena Ibu Bapak sekarang kan tahu yang sudah menikmati terutama masyarakat kecil, nanti ada petani, ada nelayan dan yang lain-lain. Jadi kalau mau merealokasikan benefit pasti akan menimbulkan dampak sosial. Jadi juga harus tetap dikaji secara hati-hati

dari sisi resiko sosial, politik sampai kepada tujuan dampak ekonominya. Namun Presiden kan sudah mengharapakan kita semua memformulasikan policy yang betul-betul baik untuk ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita juga akan tetap melakukan berbagai evaluasi ini. Dan tentu nanti kalau ada keputusan politik apakah nanti akan realokasikan maka akan berimplikasi kepada beberapa benefit yang selama ini dinikmati oleh kelompok yang sudah menikmatinya.

Mungkin itu Pimpinan.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Pimpinan, justru saya hanya menekankan saja, justru itu poinnya karena ini keputusan politik tempatnya disini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana yang optimal untuk kepentingan negara ini secara keseluruhan.

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, sudah selesai Bu?

**MENTERI KEUANGAN:**

Belum masih panjang Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya silakan Bu.

**MENTERI KEUANGAN:**

Karena pertanyaannya banyak dan kalau sudah lama ngga bertemu jadi dan sekaligus banyak sekali pertanyaan. Kami hanya ingin melaporkan insentif-insentif kepabeanaan juga yang luar biasa banyak dan dampaknya luar biasa positif yang kita juga track. Ini supaya kita juga selain akuntabilitas juga untuk melihat apakah suatu policy kita itu cukup baik. Fasilitas Kawasan Berikat dan Kite kita didalam mendorong eksport maupun jumlah yang sudah menikmatinya, jumlah perusahaan yang menikmati. Untuk Kite 362 perusahaan, Kawasan Berikat 1.244. Nilai investasi mereka mencapai 178. Untuk kite dan KB dan dari sisi kontribusi eksport mereka itu cukup tinggi yaitu 34,37 persen. Untuk insentif fiskal yang lain ini adalah update mengenai beberapa revisinya dan apa yang masuk didalam insentifnya yang saya ingin laporkan kepada Komisi XI adalah untuk tax holiday yang kita simplifikasi luar biasa. Dulu itu sampai harus diteliti dulu investasinya sekarang begitu mereka masuk dalam sektor ya mereka langsung diberikan. Dari mulai April tahun lalu sampai sekarang sudah 290 investasi baru yang mendapatkan tax holiday dari 25 wajib pajak yang akan mempekerjakan 16.800 pekerja yang berlokasi di berbagai daerah. Ini yang sesuai dengan sektor strategis yang sudah

didefinisikan oleh BPKP maupun sektor industri. Untuk tax allowens sampai saat ini sudah 149,2 triliun dari 156 SK tax allowens yang kita tandatangani terdiri dari tadi berbagai macam sektornya dan juga dari sisi fasilitasnya. Ini yang tentu saja merupakan tambahan untuk meningkatkan investasi kita.

Terakhir mungkin Pimpinan kami tidak akan lupa untuk memohon agar Komisi XI menjadwalkan konsultasi mengenai cukai plastik, karena sudah ada di dalam Undang-Undang APBN namun kami belum membuat PMK nya untuk melaksanakan karena harus melalui konsultasi dengan dewan. Kita semua sudah tahu bahwa plastik itu banyak sekali dampaknya dan kita coba untuk membuat policy untuk mengurangi konsumsi plastik, dan instrument yang paling cocok adalah cukai.

Mungkin itu yang kami bisa sampaikan kepada Pimpinan mengenai, oh untuk PNBPN terakhir kemarin pertanyaan dari beberapa Anggota sesudah Undang-Undang PNBPN apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Ada RPP yang sekarang sedang kita siapkan untuk tatacara penetapan PNBPN tarifnya pengelolaan PNBPN tatacara pemeriksaan PNBPN dan RPP untuk keberatan, keringanan dan pengembaliannya. Kita sudah melakukan agar organisasi didalam pengelolaan PNBPN ini sama kuatnya dengan penerimaan pajak dan bea dan cukai. Ini didalam rangka kita untuk juga meningkatkan sinergi diantara sumber penerimaan negara tersebut. Kalau kita lihat PNBPN kita itu sangat tergantung dari SDA. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat disini harga ICP maupun harga Batubara yang dilihat dengan kurva merah dan hitam dengan barnya yang merupakan revenew kita lihat naik turunnya PNBPN sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga sumberdaya alam kita itu. Ini yang menggambarkan bahwa ini harus memerlukan suatu treatment khusus maupun posisinya didalam APBN kita.

Terakhir Pimpinan mengenai pertanyaan kemarin karena tema kita adalah spending better jadi kami ingin sedikit mengupdate kepada dewan mengenai upaya-upaya apa yang sudah dan akan terus dilakukan untuk menciptakan belanja yang lebih baik. Kalau kita memahami belanja ini terutama yang KL terdiri dari empat kategori belanja barang, modal, pegawai dan Bansos. Masing-masing membutuhkan disaint dan implementasi yang lebih baik agar dampaknya ke perekonomian dan masyarakat untuk kesejahteraan menjadi lebih baik. Untuk belanja barang penyakit utamanya adalah pemborosan dan belanja untuk yang non produktif, artinya komposisi pendukung lebih besar ini yang Presiden sering menyampaikan di beberapa acara. Dan bagaimana memperkuat sinkronisasi belanja KL dengan belanja daerah. Karena seperti kami sampaikan tadi Pimpinan banyak KL yang belanja kemudian dia dihibahkan ke daerah. Dan tidak selalu juga sinkron daerahnya belum tentu juga mau menerima hibahan itu karena kemudian ada implikasinya. Jadi kita lihat memang didalam nanti laporan keuangan karena sebentar lagi mungkin Komisi XI atau Badan Anggaran akan membahas RUU mengenai pertanggungjawaban. Mungkin banyak hal-hal yang spesifik yang menjelaskan hubungan antara keuangan pusat dan daerah ini perlu untuk diperbaiki didalam rangka untuk memperbaiki kualitas belanja juga. Untuk belanja modal mungkin yang paling penting adalah masagenya percepatan pelaksanaan kegiatan dan bagaimana fokus kualitas belanja modal yang berhubungan dengan produktifitas dan daya saing. Untuk belanja pegawai yang paling penting adalah meningkatkan peningkatan belanja pegawai

terutama Tukin seharusnya dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kinerjanya. Dan yang terakhir untuk Bansos dan subsidi yang banyak menghasilkan penurunan kemiskinan, mungkin yang dari Komisi XI saja banyak yang menyampaikan mengenai sasaran, sasaran terpadu dan juga integrasi program Bansosnya. Ini adalah salah satu evaluasi yang kami mintakan untuk BKF maupun DJA melakukan dan Dirjen Perimbangan Keuangan mengenai evaluasi belanja kita. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mungkin kalau lihat yang kurva kiri itu terlihat sekali. Tahun 2015 belanja barang itu melonjak sangat tinggi, grosnya itu 32.

Makanya Bapak Presiden waktu kita melakukan presentasi KEM-PPKF dan pagu indikatif instruksi beliau adalah kembali ke base line 2015, karena ini sempat terjadi kenaikan yang melonjak tinggi dan kemudian grosnya tetap dobel digit sebelas, dua belas, lima belas. Jadi belanja barang itu melonjak sangat tinggi dan juga dari sisi peruntukannya juga perlu. Maka mulai tahun 2019 kami sudah mulai melakukan pengereman, karena itu Presiden Wapres betul-betul menginstruksikan kami untuk melakukan sedikit. Ini yang mungkin akan memberikan dampak dan melakukan. Kalau dilihat sebelah kanan ini terlihat lagi komponen belanja barang yang melonjak seperti dobel digit itu belanja pemeliharaan 23 persen. Ya rusak atau karena kita beli barang modal banyak kan berarti ada implikasi belanja pemeliharaannya Bapak juga. Kemudian perjalanan dalam negeri grosnya 13 persen, belanja luar negeri 10 persen. Dan yang terakhir ini yang tadi saya sampaikan belanja barang yang untuk dihibahkan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah itu melonjak ke 39. Ini yang kami dengan Bappenas nanti akan perlu untuk melihat belanja-belanja KL karena yang dilakukan oleh KL ini yang kemudian diberikan kepada daerah atau untuk masyarakat yang not neceserally adalah sesuai dengan prioritas besarnya. Apa efektifitasnya mungkin masih bisa diperbaiki.

Oleh karena itu kami melakukan penajaman belanja terutama belanja barang agar dia bisa memberikan dampak multi player lebih besar. Jadi reform dari sisi belanja menjadi sangat penting. Belanja yang tumbuh tinggi porsinya besar mungkin akan dilihat dan direview paling utama. Presiden sudah meminta supaya itu dilakukan secara sistematis ke masing-masing KL. Penghematan juga dilakukan bukan untuk mengurangi belanja tapi merealokasi belanja supaya lebih berdampak kepada masyarakat, terutama untuk honor, ATK, bahan-bahan pemeliharaan gedung, kemudian penajaman dari sinkronisasi belanja ini tentu dengan Bappenas dan RKKL nya yang mereka perlu untuk disinkronkan. Kemudian kita juga mendorong agar kementerian/lemaga dan pemerintah daerah aktif menggunakan KPBU, karena dia bisa belanja modal yang sepertinya tidak harus selalu tergantung atau menunggu APBN, dan tentu untuk reformasi birokrasi. Belanja barang akan tetap dijaga pada kisaran 1,7-1,8 persen dari GDP yang sebetulnya ngga turun namun ini juga konsisten dengan tadi belanja pemerintahan untuk pertumbuhan tetap di 5,3 hingga 5,6. Ini adalah kalau untuk TKDD kami juga mendapati persoalan yang sama. Jadi efektifitas belanja yang sekarang sudah mencapai di atas 800 triliun itu mendekati 850 triliun menjadi sesuatu yang fokus menjadi kita.

Fokus belanja pegawai di daerah yang mencapai 39,5 persen, barang jasa 20 persen, belanja modal hanya 21 persen dan belanja lainnya. Kami juga

melihat ketidakstandartan dari sisi belanja terutama pegawai yang bisa sangat tinggi sekali. Ada yang daerah yang sangat kaya sangat tinggi eselon satunya bisa sangat tinggi sekali bahkan lebih tinggi dari pusat, dan kemudian ada yang daerah miskin yang mereka tidak memiliki. Tentu kita harus mengharapkan supaya pemerataan kapasitas dan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik tidak berbeda-beda sangat besar. Kemudian kemarin ada pertanyaan dari salah satu Anggota mengenai biaya operasi sekolah, kalau ngga salah dari siapa kemarin, oh dari Pak Johnny Plate, eh ngga deh, Pak Jon Erizal mengenai Bos kami sampaikan ini bahwa mekanisme Bos itu adalah sebetulnya didalam rangka untuk base on penyampaian realisasi berdasarkan kinerja. Jadi kami didalam penyalurannya memang melakukan tahapan. Ada empat tahapan, 20, 40, 20, 20 persen yang semuanya berdasarkan realisasi. Mungkin ada aspirasi supaya ditingkatkan lebih tinggi di depan front loading namun nanti kita akan coba lihat berdasarkan akuntabilitas karena kalau daerah itu kita memang juga harus cukup ketat untuk memonitor kinerjanya karena variasinya sangat banyak. Ada daerah yang sangat bagus ngga perlu diawasi saja sudah bagus, ada yang memang perlu untuk diawasi betul.

Mungkin itu Pimpinan, dan untuk yang masalah hutang

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Pak Ketua, interupsi sebentar Pak mengenai belanja Pak, mengenai belanja.

**KETUA RAPAT:**

Nanti ngga banyal lagi ya.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Ngga Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya. Ngga supaya jangan ...(suara tidak jelas) kalau mau bertanya panjang nanti ...(suara tidak jelas)

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Ngga ngga Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Kemarin kan ada satu pertanyaan saya Bu mengenai belanja ini. Mengenai yang di, ini kan untuk belanja yang lebih baik, perbaikan yang di

bawah base line dan di atas base line. Dan ini kan harus dibuka kembali Bu. Karena apa, ada mandatori-mandatori yang kemudian yang sifatnya sangat konstitusional, misalnya jangan sampai kemudian belanja-belanja yang di bawah base line itu kemudian yang sifatnya harusnya ada di permukaan kemudian ada di bawah, di bawah base line kita. Karena apa, ada mandat-mandat yang berkaitan, berkaitan dengan misalnya biaya pendidikan, kesehatan yang sudah dimandatkan. Lah ini kan akan mempengaruhi kualitas. Kalau kita berbicara tentang baik terspending yang ada disini apakah yang kemudian menjadi isu ada disana, itu pertanyaannya Bu, terima kasih.

#### **MENTERI KEUANGAN:**

Yang kami jelaskan ini tidak spesifik mengenai yang tadi disampaikan, yang disampaikan Pak Misbakhun sebetulnya terkait temuan BPK mengenai ELMAN. Ya memang waktu jaman Pak Bambang dia secara by disaint ditaruh di *bellow the line*, tapi itu dengan logika bahwa itu merupakan investasi, makanya dia ditaruhnya didalam *bellow the line* itu termasuk yang belanja pembiayaan investasi. Namun BPK memiliki pendapat yang ini jadi temuan di tahun 2018 eh 2017 dan 2018. Kami sekarang sudah memberikan untuk Pak Wamen sebagai Ketua IAI juga dan Bu Sum dari Irjen kita untuk bisa membahas temuan BPK itu didalam menempatkan secara benar dan melaporkan secara benar. Point kita sebetulnya tidak ada keinginan dari pemerintah untuk melakukan apa-apa dulu waktu Menteri Keuangan Pak Bambang mendisaint dibawah *bellow the line* juga karena ada logikanya, yaitu untuk melakukan investasi dalam bentuk pembelian tanah-tanah bagi proyek strategis nasional. BPK juga punya logika dari sisi bahwa kalau belanja pemerintah dari sisi pembelian tanah untuk proyek-proyek entah itu PU atau Perhubungan. Ada sebagian yang ... (suara tidak jelas) the line kenapa yang ini di *bellow the line*, karena ini PSE. Jadi konsistensi muncul. Konsekwensinya seperti Pak Misbakhun sampaikan juga ada, kalau belanja itu naik ke atas maka kemudian mempengaruhi semua mandatori spending, pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah. Jadi konsekwensinya luas sekali memang. Maka kami sekarang sedang membahasnya bukan untuk menghilangkan apa yang disebut menjadi kewajiban pemerintah tapi kita ingin secara akuntansi benar dari sisi penyajian juga betul dan dari sisi tujuan kita untuk mengelola APBN yang baik juga tetap terjaga. Mungkin itu Pak Misbakhun nanti kalau ada membutuhkan apa, informasi lebih lanjut mengenai progres ini mungkin kami nanti bisa menugaskan Pak Wamen untuk menjelaskan secara khusus kepada Pak Misbakhun.

#### **F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

**Terima kasih.**

**Pimpinan yang saya hormati, Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Gubernur dan Pimpinan OJK beserta BPS.**

Ada yang belum dieksplor dalam yang saya tanya kemarin. Tadi sudah

dieksplor luar biasa tentang spending better. Saya nunggu-nunggu nih revenew betternya Bu. Ini sebagaimana saya sampaikan ini dua APBN adalah anggaran penerimaan dulu kan dan belanja negara. Nah kita selalu fokus di spending terus ini. Nah tadi dikupas sekilas soal tax, saya senang juga melihatnya sudah detail, Cuma cerup-cerup pasarnya yang saya lihat belum tersentuh. Secara teknisnya sudah saya lihat sudah bagus sekali Cuma ini banyak cerup pasar misalnya seperti apa strategi kita untuk ngangkat segmen-segmen yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin base on Kanwil-Kanwil dan seterusnya. Kemudian misalnya lagi kaitan dengan pajak yang kita telah berhasil dengan tax amnesty, tapi tindak lanjut dari situ belum jelas tergambar di strategi ini kedepan seperti apa yang dulu kita dapat gambaran ada tiga ribu sampai empat ribu triliun ada di luar yang harapan kita bisa kita tarik kembali. Kemudian dengan yang lima ribu triliun lebih yang sudah dideklarasikan itu seperti apa juga belum nampak tajam. Nah kemudian kaitan dengan bea cukai. Bea cukai kita lihat ya selalu mencapai target. Nah kalau saya lihat bea cukai itu bukan hanya target yang berkaitan terhadap cukai tapi juga yang kaitan terhadap smagling. Ini smagling yang berkaitan dengan hasil hutan, smagling yang berkaitan dengan tambang. Ini strateginya seperti apa gitu untuk menahan itu semua. Ini juga akan banyak menyita kekayaan kita. Nah juga belum terlihat disini, harapan saya itu bisa terlihat gitu. Ada kesulitan apa di lapangan misalnya teman-teman bea cukai, karena kita bisa ambil satu putusan politik seperti apa gitu.

Kami juga paham tidak mudah memang permasalahan yang ada di lautan itu. Nah kemudian kaitan dengan PNBPN juga, PNBPN juga masih disentuh sangat datar sekali. Saya melihat waktu kami pembahasan seperti yang disampaikan Pak Misbakhun yang lalu ini luar biasa tajamnya, luar biasa kita melihat ada potensi penerimaan negara yang cukup besar. Nah salah satu yang belum disentuh juga belum ada niat pemerintah untuk mengangkat PNBPN ini ke tingkat yang lebih tinggi, karena setahu saya ngga tahu mungkin hari ini sudah berubah. Masih ditingkat eselon tiga ya Bu ya. Nah sementara hasilnya itu sudah 400 triliun lebih itu. Bea cukai mungkin dulu 200 triliun sudah punya dihandel oleh eselon satu, nah ini juga belum kelihatan. Nah ini sampai serius apa ini kita mau menangani soal penerimaan ini.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya silakan Bu.

#### **MENTERI KEUANGAN:**

Untuk penerimaan negara tadi yang kami sampaikan seluruh reform dan upaya-upaya untuk melakukan penerimaan pemerintah dari sisi perpajakan maupun PNBPN melalui joint forces tadi yang telah kami sampaikan mengenai potensi-potensi terutama PNBPN. Dan kalau dari sisi apa eselon di Kementerian Keuangan kita akan naikan tentu sajak kepada eselon dua, namun dalam hal ini memang bukan berdasarkan jumlahnya karena itu berdasarkan effort bea cukai walaupun dibawah 400 triliun tapi dia tugas untuk menjaga seluruh daerah kepabeanan itu jauh lebih besar. Jadi tidak hanya melulu dari sisi



jumlah penerimaan negara tapi juga dari skop tanggung jawabnya yang harus dilakukan. Kalau kita melakukan secara bersama-sama seperti tadi disampaikan ini adalah upaya kita yang tadi saya sampaikan tidak hanya dari sisi pajaknya saja tapi saya sampaikan dibawah ini DJP, DJA dan DJBC didalam rangka untuk menyeimbangkan apakah kewajiban seseorang atau wajib pajak terhadap negara dalam bentuk perpajakan ataupun non pajak dia mendapatkan pelayanan maupun treatment yang konsisten dan sama. Ini supaya tidak ada perbedaan kalau di di DJA menjadi seperti ini di DJBC begini di DJP seperti itu. Ini yang kita coba hindarkan melalui ini joint area. Kalau nanti dia akan menjadi SOP nya menjadi makin sama bisnis prosesnya makin sama bahkan nanti didalam pengembangan kortek sudah masuk didalam kategori untukantisipasi penerimaan perpajakan dari BC maupun non pajak yang di DJA maka dia juga bisa menjadi investasi bersama Pak Jon Erizal.

Jadi didalam hal ini sebetulnya bukan hanya masalah pajak saja tapi kami melihat dari sisi keseluruhan penerimaan negara yang kita coba lakukan. Untuk beberapa potensi penerimaan pajak kita untuk tax amnesty kita tadi saya mungkin belum menyampaikan dan mungkin nanti kalau boleh saya minta dalam bentuk forum yang berbeda karena ada beberapa yang sifatnya juga sangat sensitif dampaknya. Tapi kami mungkin juga akan menyampaikan bahwa progres AEOI maupun undang-undang mengenai informasi bersama dengan tax amnesty yang kita lakukan itu memberi implikasi yang luar biasa. Dan memang ini inforsment sekarang harus dilakukan sesuai dengan mandat Undang-Undang Tax Amnesty yang waktu itu sudah disetujui antara pemerintah dengan DPR. Dan ini yang kami tadi sampaikan secara mungkin tidak secara eksplisit tapi saya sampaikan keinginan kita untuk menaikkan dan meningkatkan inforsment didalam rangka untuk tax ratio harus terus kita jaga balancenya dengan keinginan kita untuk memperbaiki iklim investasi. Maka fokus kita tadi adalah fokus yang terutama mereka yang totaly belum complay. Sementara yang sudah complay kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan dan kepastian yang sangat jelas. Ini yang terus akan kita bangun terutama berkomunikasi kepada para pelaku usaha, dunia usaha mengenai pelaksanaan.

Karena kalau kami betul-betul konsisten sekarang melakukan inforsment saya akui pasti akan menimbulkan dampak tekanan kepada hampir banyak sekali dunia usaha. Karena kita lihat postek amnesty dan juga dari *automatic in soft information* itu informasi yang kita peroleh sekarang dari semua jurisdiction itu sifatnya sangat detail. Dan juga akses kita terhadap laporan keuangan dan acount yang diperbankan itu juga memberikan informasi yang luar biasa detail sekarang ini. Jadi kami sekarang kalau bicara tentang hal itu sudah sangat spesifik. Berapa jumlah acount yang punya NPWP, berapa yang tidak punya NPWP bahkan ada acount yang ngga punya NIK dan ngga punya NPWP dan tidak ikut tax amnesty. Itu hal-hal seperti itulah yang mungkin nanti akan memberikan dampak terhadap inforsment yang kita lakukan. Dan kalau mereka pindah ke jurisdiction lain juga nanti akan dilaporkan juga ke kita. Jadi ini yang kami ingin sampaikan bahwa effort itu akan kami terus seimbangkan dengan keinginan kita untuk tidak menimbulkan dampak kepada perekonomian secara negatif. Namun inforsment dan konsistensi itu penting.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Pak Ketua masih boleh interupsi. Pak Ketua, masih boleh interupsi ngga Pak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Ini, ini kalau ngga, ngga kelar-kelar. Nanti saja nanti nanti, gini mendingan sekarang selesaiin dulu pemerintah baru nanti saya buka ini. Jadi dihentikan dululah kalau ngga ini ngga kelar-kelar kita. Ya silakan Bu.

**MENTERI KEUANGAN:**

Pimpinan yang terakhir kemarin pertanyaan dari Pak Johnny Plate, Pak Johnny jangan pergi dulu dong Pak Johnny saya mau menjawab Bapak ini. Sama Pak Misbakhun mengenai hutang kemarin. Jadi kemarin dari Pak Misbakhun, Pak Johnny Plate menyampaikan seharusnya kita menjelaskan mengenai masalah hutang sebagai suatu instrument APBN atau fiskal. Dan kita memang sepakat dan terus melakukan itu. Kalau kita lihat gambar ini sebetulnya untuk menggambarkan beberapa statement yang sering kita lakukan bahwa APBN termasuk pembiayaan atau hutang itu adalah instrument, termasuk yang sering kita gunakan adalah counter siklikel. Kalau kita lihat APBN kita grosnya mengalami tekanan terutama pada saat harga komoditas menurun makanya pertumbuhan ekonominya turun dari 5,8, 5,6, 4,8 kemudian mulai pulih lagi 5,7 sampai di 5,17. APBN kita dari sisi defisit kita lihat dibawah itu adalah mencoba untuk mengcounter siklikel. Bar yang sifatnya abu-abu menjadi lebih dalam pada saat ekonomi kita melemah. Itu adalah tujuannya untuk mengcounter pelemahan. Itu dari sisi makro ekonominya. Jadi bahwa fiskal itu didisaint terutama defisitnya bukan sebagai *stand allon policy* tapi dia adalah bagian dari pengelolaan ekonomi makro didalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Itu yang ingin kami sampaikan melalui data ini, yaitu bahwa dia akan fleksibel kalau ekonominya membutuhkan kita harus defisit lebih gede ya kita lakukan. Kalau kita sudah ekonominya cukup sehat dan kita harus mengurangi defisit untuk menjaga fiskal space kita dan untuk sustainability maka kita juga akan mengurangi gitu. Jadi dia bukan tujuan dia alat karena sering masyarakat menjadi tujuan jangan berhutang lagi kalau perlu semuanya ngga boleh hutang. Itu sudah menjadi beda karena dia adalah disaint sebagai instrument dan memang dalam peraturan perundang-undangan kita adalah.

Nah untuk bisa meyakinkan pada Anggota DPR dan seluruh masyarakat bahwa pengelolaan APBN itu kita lakukan secara hati-hati, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Kita tentu melihat konteks ekonominya, kita melihat dari sisi pasar keuangan dan dari sisi kebutuhan investasi. Terus terang kalau kami sekarang banyak melakukan retail karena kami ingin melakukan investorbesnya lebih banyak dan saya senang karena sekarang bahkan generasi z pun sudah mulai membeli SBN retail kita. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini anak-anak yang lahir sesudah tahun sembilan tujuh, eh sembilan tiga, jadi usianya dibawah 25 tahun tapi mereka sekarang sudah mulai terbiasa membeli SBN retail baik yang sukuk maupun yang biasa. Jadi

kalau kita lihat komponen antara generasi z sama generasi w, x dan baby boomer memang kalau dari sisi pelakunya masih maksimum baby boomer. Yang punya uang lebih banyak juga baby boomer. Jadi mereka biasanya membeli paling banyak. Tapi point saya adalah melakukan ekspansi *investment base*. Investor base di Indonesia menjadi penting kalau kita tidak ingin surat hutang kita menjadi terlalu volatail pada saat terjadi gejolak di sektor global.

Terakhir juga untuk mengatakan bahwa hutang dijadikan sebagai instrument dari sisi *counter siklikel* yaitu kalau dia harus ekspansif untuk menjaga momentum dan menghindari *oportunity loss* dan untuk tetap menjaga fiskal space kita dalam rangka akselerasi tujuan pembangunan nasional. Di Undang-Undang Nomor 17 sudah sangat jelas dan ini kami terus ulangi bahwa kita tetap menjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kurang dari tiga persen dari sisi defisit per tahunnya dan total hutang tidak boleh lebih dari enam puluh persen bahkan kita sekarang menggunakan hard limit yaitu tiga puluh persen, padahal sebetulnya undang-undang membolehkan sampai enam puluh persen. Nah dampaknya didalam hutang dibandingkan dengan hal-hal lain. Kita lihat disini ya, kan sering kalau dijadikan head line terutama media adalah yang Cuma nominalnya saja. Padahal dari sisi terhadap GDP itu masih tetap dibawah tiga puluh persen. Itupun kita anggap sebagai hard limit, karena sebetulnya *by law* kita boleh sampai enam puluh. Dan kalau kita lihat sebelah kanan lagi lebih dramatis lagi menggambarkan. Tambahan hutang yang merah-merah ini dibandingkan dengan tambahan belanja produktif itu jauh lebih besar belanja produktifnya. Tahun 2014 tambahan hutang 233 tapi belanja produktif untuk infra, pendidikan, kesehatan naik 710 plus belanja ke daerah. Tahun 2015 yang hutangnya nambah cukup besar tapi belanja produknya naiknya juga sangat besar.

Demikian setiap tahun bahkan tahun tujuh belas, delapan belas naiknya hutang itu jauh sekarang lebih kecil. Kalau kita lihat sebetulnya menurun tapi belanja produksinya melebihi dari 1000 triliun. Ini yang sering walaupun kami menyampaikan ini berkali-kali tapi memang kadang-kadang untuk bisa mendapatkan clip baik media sosial itu hanya lihat yang nominal hutang saja, tapi yang biru ngga pernah disebutkan. Kita moga-moga sekarang sore ini agak menyebutkan itu. Kalau kita lihat didalam ini malah lebih lagi agak mungkin agak membingungkan, tapi hutang itu grosnya adalah yang hitam. Jadi grosnya 16 persen tahun 2015 puncaknya naik 48 persen grosnya. Kemudian menurun bahkan sekarang sudah negatif gros hutang kita, ya tahun 2019 itu negatif 14 persen. Kita lihat waktu itu kita melakukan counter siklikel makanya gros hutang naik kemudian kita menurun. Namun kalau kita lihat hampir semua belanja produktif naiknya cukup tinggi, grosnya ya grosnya. Jadi yang merah infrastruktur gros dari infrastruktur itu double digit bahkan double digitnya di atas 40 persen, 60 persen gitu ya. Kemudian kalau kita lihat grosnya dari sisi pendidikan yang biru, dan kalau dilihat dari kesehatan adalah yang hijau. Jadi saya mau menunjukkan bahwa pada saat gros hutang yang hitam itu menurun justru belanja produktif kita meningkat. Ini tadi yang gambar yang sebelumnya halaman sebelumnya mengkonfirmasi. Kalau Bapak dan Ibu lihat tujuh belas, delapan belas dan sembilan belas ini belanja produktif kita semuanya di atas 1000 triliun tadi dengan gros yang double digit, tapi hutang kita justru malah makin menurun tambahan hutang kita makin menurun makanya grosnya negatif. Mungkin ini untuk bisa memberikan tambahan bahwa kami sangat hati-

hati ekstrimly hati-hati mengelola hutang ini. Dan untuk indikator hutang 2011-2019 untuk menggambar kemarin ada yang menanyakan dengan adanya SNP sebetulnya kita lebih baik atau ngga.

Ini beberapa contoh. Kalau kita lihat resiko bunga hutang kita mengalami penurunan yang konsisten dari semenjak kita kemudian mendapatkan investment grade sampai sekarang. Resiko valas kita juga kita upayakan menurun dengan porsi valas sekarang menurun dibawah 40 persen. Hutang jatuh tempo kita dalam waktu tiga tahun tetap stabil, artinya kita tidak tiba-tiba sekarang menjadi hutangnya jatuh tempo makin pendek dan berarti rol overisnya meningkat tinggi sekali. Dan dengan peningkatan SNP yang kemarin 31 Mei, ini kemarin ada yang menanyakan kita mendapatkan dengan yeard soon kita turun sebanyak 34 basis point, artinya dinamika market dan image maupun reputasi Indonesia mengelola hutang itu ada track recordnya dan kita jaga berdasarkan pakem-pakem atau prinsip-prinsip yang memang sangat hati-hati, tentu dengan juga melihat dari sisi belanjanya tadi yang untuk dikaitkan dengan belanja produktif. Ini moga-moga bisa memberikan penjelasan baik-baik. Dengan penjelasan tersebut tentu kami mohon untuk persetujuan Komisi XI sesuai dengan asumsi makro yang telah kami sampaikan didalam presentasi kami sebelumnya yaitu rens pertumbuhan ekonomi antara 5,3 hingga 5,6, inflasi antara 2 hingga 4, suku bunga SPN 5 hingga 5,6 dan nilai tukar rensnya di 14 hingga 15 ribu yang telah kami sampaikan kepada dewan baik di Paripurna, Badan Anggaran maupun di Komisi XI.

Demikian Pimpinan mohon maaf waktunya agak panjang namun ini sekaligus untuk memberikan banyak update informasi mengenai policy pemerintah.

Terima kasih.

*Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan sedikit saja Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri Keuangan secara khusus dari penjelasan terakhir ini saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan dan seluruh jajarannya bahwa kebijakan ekspansif yang didukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan itu khususnya ya pengendalian defisit dibawah dua persen atau pada kisaran satu lima dua sampai dengan satu lima persen PDB ratio hutang yang dijaga pada level sekitar 30 persen. Dan keseimbangan primer yang kali ini kita akan membuat sejarah baru didalam APBN kita secara positif antara 0,0 sampai 0,2 persen PDB itu perlu kita apresiasi dan kita jaga bersama APBN kita yang sehat dengan pengendalian penerimaan negara dan pengawasan belanja negara yang memadai. Dari sisi asumsi makro Fraksi Nasdem pasti sejalan dengan pemerintah.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya ini bicaranya sudah kaya eksekutif ini si, sudah beda. Pak Hatari mau bicara mau tanya tadi.

**F-NASDEM (DR. ACHMAD HATARI, SE., M.Si.):**

Ya saya khawatir Ketua Komisi selalu dia di belakang jadi tidak baca WA saya, yang ...(suara tidak jelas) tadi. Bu Menteri sudah capai sekali, saya mengamati Ibu sudah capai sekali tapi iijinkan saya sharing satu dua point saja Bu ya. Terkait dengan soal hutang memang Komisi XI selalu membarikan pemahaman kepada publik bahwa pemerintah dalam mengelola hutang cukup baik, aman. Terkait dengan hutang disini Bu terus-terang bahwa hutang pemerintah, hutang swasta ini terus meningkat. Sementara kita membutuhkan selain investasi juga pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan Ibu Menteri dapat mengawal ini APBN bukan hanya sustainable APBN yang berkesinambungan tetapi juga merawat APBN yang sehat. Yang kedua Bu Menteri mudah-mudahan saya salah, tapi tadi ditampilkan jumlah penerimaan negara 1,786,4 di halaman delapan dari paper ini tadi, ya itu. Saya dan barangkali teman-teman Komisi XI ingin mendapat gambaran sudah memasuki kuartal yang pertama. Adakah gambaran dari sebesar ini berapa yang sudah terealisasi. Yang kedua mudah-mudahan saya juga salah Bu didalam budget sistem khususnya penetapan target penerimaan negara itu rumusnya realisasi tahun yang lalu ditambah akres yang ditetapkan sepuluh persen itu menjadi penetapan penyusunan anggaran tahun berikutnya, itu rumusnya. Paling tidak sepuluh persen realisasi tahun yang lalu dijadikan dasar untuk penyusunan tahun yang akan datang, itu Bu saya kira itu. Yang berikut Bu mengenai kenaikan asumsi makro seperti yang kita bicarakan ini pertanyaan kami adalah apakah pemerintah dapat memastikan bahwa penerimaan negara kita 2020 cukup aman, karena disini kita menyinggung juga soal konsumsi sementara komponen konsumsi adalah yang paling besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian apakah target kita 5,3 sampai 5,6 ini sinkron, atau secara agregat memiliki korelasi dengan angka 5,3 sampai 5,6. Yang terakhir dalam kondisi ekonomi yang kontraksi ini termasuk yang lagi gencar-gencar sekarang ini yang belum terselesaikan pemerintah hoaks-hoaks saja adalah soal kenaikan harga tiket yang belum mereda sampai hari ini. Apakah ada kebijakan kelonggaran terkait dengan PPN yang perlu dilakukan agar dapat mendorong pertumbuhan sektor riil.

Barangkali itu Bu, minta maaf Ibu sudah capai.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Bambang ada tambahan.

## **MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:**

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
**Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak Anggota Komisi XI DPR RI.**

Mungkin kami melengkapi jawaban dari beberapa pertanyaan yang langsung ditujukan kepada Bappenas. Pertama mengenai terobosan untuk pertumbuhan ekonomi yang ditanyakan oleh beberapa Anggota khususnya oleh Pak Sarmuji. Pada intinya Indonesia pernah mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan yang sangat tinggi untuk periode yang cukup panjang yaitu tahun 1990 sampai 1998. Dan itu terjadi karena ketika Indonesia masih punya sumberdaya alam yaitu Migas dan Kayu. Pada saat yang sama yang mendominasi pertumbuhan itu adalah industri pengolahan, khususnya industri pengolahan yang padat karya. Dengan komposisi seperti itulah kita bisa melihat bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan rata-rata tahunan tujuh bahkan sampai delapan persen. Sehingga kalau ditanyakan apa yang perlu menjadi terobosan atau apa yang perlu diprioritaskan supaya kita bisa kembali ke pertumbuhan seperti itu dan tidak terjebak pada pertumbuhan optimal sekarang yang menurut perhitungan kami adalah 5,3 persen maka jawabannya adalah perlunya prioritas yang benar-benar tajam untuk investasi di sektor yang bukan sumberdaya alam khususnya sektor manufaktur dan jasa, atau intinya investasi di sektor yang menciptakan nilai tambah yang cukup tinggi. Tadi Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan mengenai insentif pajak yang ditujukan juga untuk investasi dan kalau tadi Ibu dan Bapak perhatikan sektor-sektornya kebanyakan juga adalah sektor manufaktur, jadi sudah mengarah kesana.

Dari segi perijinan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah yaitu *online single submission* dengan tujuan untuk mempermudah investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi sebenarnya tidak ada magic work yang penting adalah kita bisa kembali lagi prioritas pada investasi di sektor manufaktur dan jasa khususnya yang punya nilai tambah tinggi. Kemudian pertanyaan Pak Sarmuji yang lain juga terkait dengan beberapa pertanyaan sesudahnya mengenai kenapa Indonesia mempunyai kesenjangan antar wilayah yang susah untuk diturunkan. Kalau dibicarakan kesenjangan antar wilayah itu sudah terjadi sebenarnya sejak ya kalau kita melihat sejarahnya sejak awal kemerdekaan. Bagaimanapun ada perbedaan kalau saya istilahkan perbedaan start antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Karena Pulau Jawa dengan dari sejak jaman kolonial Hindia Belanda juga sudah ekonominya berkembang dengan basis pada perkebunan, ya dan pada misalkan Tebu maupun pertanian secara umum. Nah kemudian kalau melihat kondisi ketika desentralisasi dilakukan, eh sebelum desentralisasi ketika tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tinggi tujuh sampai delapan persen tahun sembilan puluh sembilan puluh delapan basisnya adalah industri pengolahan padat karya.

Dan Bapak Ibu tahu dimana lokasi dari industri pengolahan padat karya itu, adanya di Jawa. Jadi pada waktu Indonesia tumbuh cepat Jawa juga

tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Kenapa, karena daerah lainnya kalau kita lihat struktur ekonominya sampai hari ini semuanya masih bertumpu kepada sumberdaya alam. Baru Pulau Jawa yang kalau kita lihat struktur ekonominya sudah bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa. Dan 2001 ketika kita melakukan desentralisasi waktu itu kontribusi Pulau Jawa 55 persen, luar Jawa 45 persen. Ternyata data terakhir 2018 Jawa bukannya turun dengan desentralisasi malah naik menjadi 58 persen, kemudian luar Jawa malah turun jadi 42 persen. Penyebabnya kembali lagi kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya ternyata dalam periode yang cukup panjang sejak 2001 Pulau Jawa punya tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, meskipun tidak terlalu tinggi biasa disepertikan 5 sampai 6 persen untuk provinsi-provisni di Pulau Jawa tapi dia tumbuh stabil. Sedangkan pulau-pulau di luar Pulau Jawa karena tergantung pada sumberdaya alam memang pernah seperti Kalimantan dan Sumatera itu tumbuh di atas Pulau Jawa, ya tapi kemudian karena tergantung kepada komoditas ketika komonity boom berakhir maka otomatis pertumbuhan Sumatera dan Kalimantan terutama itu langsung turun drastis bahkan pernah Kalimantan itu tumbuh negatif pada akhir dari komonity booming. Pulau di luar Pulau Jawa yang punya karakter seperti Pulau Jawa yaitu tumbuh stabil dan cukup tinggi adalah Sulawesi.

Sulawesi ini relatif bisa terbebas dari apa volatilitas komoditi booming, artinya dia tidak terlalu terpengaruh dan masih bisa tumbuh relatif cukup tinggi, kenapa karena di Sulawesi sudah mulai dilakukan yang namanya hilirisasi dari sumberdaya alam yang dihasilkan di Sulawesi sendiri sehingga dia bisa menutupi pergerakan harga dari komoditas mentahnya. Lah tentunya lima tahun kedepan kita tidak bisa mendiamkan hal itu begitu saja. Dan dari visi 2045 yang kami luncurkan waktu Musrenbangnas tujuannya juga boleh dibilang tidak terlalu ambisius, karena kalau kita lihat sekarang kontribusi Indonesia Barat, Jawa dan Sumatera itu 80 persen yang liannya 20 persen. Target 2045 Jawa Sumatera turun dari 80 menjadi 75 persen sedangkan di lainnya berarti naik jadi 25 persen. Jadi 5 persen dan butuh waktu yang relatif panjang. Tapi tentunya perlu ada upaya yang dilakukan lima tahun kedepan yang sudah kami masukan dalam RPJMN tenokratis. Yang pertama adalah industrialisasi di luar Pulau Jawa, khususnya industrialisasi yang terkait dengan hilirisasi sumberdaya alam, itu langkah pertama. Langkah kedua untuk menunjang industrialisasi itu maka akan dilakukan pengembangan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan, baik itu yang berupa kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan strategi pariwisata nasional. Kemudian yang ketiga untuk daerah perkotaan kita akan mulai mengembangkan, yang juga termasuk pertanyaan dari Pak Andreas yaitu yang namanya daerah metropolitan. Jadi pengembangan kota itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah administratif seperti sekarang tetapi basisnya adalah wilayah metropolitan. Wilayah metropolitan adalah kota inti dengan kota-kota sekitarnya yang sebenarnya merupakan suatu kesatuan ekonomi, sehingga pengembangannya terutama untuk infrastruktur dasar untuk pengembangan fasilitas bersama tidak perlu dilakukan sendiri-sendiri tapi dilakukan secara bersama-sama. Tentunya perlu ada landasan hukum nantinya dan perlu ada mekanismenya. Dan kami sudah bekerjasama dengan BPS untuk mulai menyusun data daerah yang basisnya metropolitan.

Jadi kita data misalkan PDRB Kota Malang, PDRB Kota Batu, PDRB

Kabupaten Malang, tapi kita bicara PDRB wilayah metropolitan Malang misalkan sehingga jelas bagaimana potensi Malang dan kemudian kita lihat juga nanti secara detail apa yang masih kurang, misalnya infrastruktur di Kota Malang. Dan juga kita ingin terutama menangani Jakarta, ya karena bagaimanapun wilayah metropolitan Jakarta hari ini total penduduknya 33 juta, ya keseluruhan. Kenapa, karena lima kota dengan penduduk terbesar di Indonesia itu ada di Pulau Jawa, maksudnya kita punya daftar sepuluh kota terbesar di Indonesia, lima terbesar itu ada di Pulau Jawa. Jakarta nomor satu 10,3 juta, Bekasi nomor tiga, Depok nomor enam, Tangerang nomor tujuh, Tangerang Selatan nomor sepuluh. Jadi bisa dibayangkan konsentrasi ekonomi konsentrasi aktifitas yang luar biasa yang ada di Jakarta. Sehingga penanganan metropolitan ini diperlukan sehingga tidak kejadian misalkan kenapa MRT hanya sampai Lebakbulus, karena nyeberang Lebakbulus sudah Tangsel, ya kenapa Basway yang Cileduk itu berhentinya di Cileduk Jakarta, karena seberangnya sudah Cileduk Tangerang, misalkan. Itu terjadi kalau kita menyelesaikannya hanya menurut wilayah administratif. Jadi pendekatannya akan dengan wilayah metropolitan. Dan menjawab pertanyaan Pak Refrizal strategi pemindahan ibukota itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendiversifikasi perekonomian tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa 58 persen GDP Indonesia dan 57 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa. 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal arealnya jauh lebih kecil daripada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan untuk menegaskan pada Pak Refrizal bahwa anggaran untuk membangun ibukota baru pertama kita mendorong yang namanya alternatif financing. Jadi tidak akan bergantung terhadap APBN. Itu sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden sejak awal. Dan kajian ini sudah kami lakukan sejak dua tahun yang lalu Pak Refrizal. Jadi kami sudah melihat bagaimana cara kita meminimumkan APBN. Ya jadi tidak ada hubungannya antara rencana pemindahan ibukota ini dengan masalah anggaran yang dibahas di apa pembicaraan pendahuluan ini, karena anggarannya itu mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021. Nah alternatif financing yang akan didorong itu adalah keterlibatan swasta, keterlibatan BUMN sebagai investor, kerjasama pemerintah badan usaha dan kerjasama pemanfaatan aset, ya.

Jadi empat kombinasi inilah yang kita harapkan bisa meminimumkan APBN yang mungkin hanya difokuskan untuk infrastruktur dasar dan beberapa gedung pemerintah misalkan Gedung Istana, DPR maupun Gedung-Gedung Lembaga Tinggi. Ini yang sekaligus menjawab dan juga kenapa kemudian pemindahannya ke luar Pulau Jawa karena tadi beban Pulau Jawa ini sudah sangat luar biasa. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jon Erizal sedikit nanti mungkin BPS bisa menambahkan. Basis data terpadu itu isinya adalah 40 persen penduduk dengan status sosial ekonomi yang terendah menurut pendapatan per kapitanya dengan nama alamat dan nomor induk kependudukan. Nah saya ini BDT dikelola Pokja data. Anggotanya lintas KL dikoordinasikan oleh Kemsos, jadi bukan Kemsos sendirian tapi Pokja KL dan saya yakin juga BPS ikut membantu. Kemudian kalau masih ada masalah data dan itu pasti masih terjadi selalu dilakukan yang namanya updateting atau pemutakhiran. Pemutakhiran dilakukan dua kali setahun, bulan Januari dan Juli. Nah BDT inilah nanti yang menjadi dasar penetapan sasaran program, apakah itu PKH, bantuan pangan non tunai, kartu sehat dan kartu pintar. Dan



yang paling penting mungkin yang Bapak Ibu menurut Dapilnya masing-masing bisa ingatkan kepada Dinas Sosial di masing-masing provinsi atau bahkan kabupaten, bahwa pemutakhiran BDT dilakukan oleh Pemda kabupaten/kota dan provinsi, artinya melalui Dinas Sosial. Melalui verifikasi dan Validasi namanya sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS). Jadi intinya waktu itu pernah saya ingat Pak Ketua Pak Melky menanyakan mengenai kabupaten di NTT, dan ternyata problemnya itu adalah di Dinas Sosialnya yang kurang mengupdate atau kurang rajin melakukan update karena update itu harus dilakukan. Ada orang yang mungkin berpindah alamat, ada orang yang mungkin sebenarnya sudah membaik status ekonominya sehingga sebenarnya tidak perlu lagi menerima bantuan tersebut. Atau sebaliknya ada yang sebelumnya tidak menerima bantuan tapi karena gagal panen karena penyakit malah harusnya menerima. Dan itu adalah pentingnya melakukan updateting dari BDT. Untuk mengenai Pina yang Pak Erizal

#### **F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Pimpinan, Pimpinan, sedikit saja Pimpinan, ini agak penting, bukan yang soal data Pak tapi yang tadi, bahwa untuk pindah itu tidak akan menggunakan APBN itu bagus. Jadi maksud kami Pak disini bukan APBN atau tidak APBN nya kalau menurut saya Pak, tapi mana yang lebih benefit buat pemerintah gitu. Kalau kita serahkan ke swasta semua, tanah itu dikelola daerah-daerah strategis oleh swasta nanti kita nda dapat apa-apa. Nah ini perlu ada komparation itu. Jadi catatan buat kami khususnya saya seperti itu Pak. Boleh nda pakai atau pakai tapi yang benefit buat negara yang mana yang lebih baik.

Terima kasih.

#### **MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:**

Mungkin sedikit menambahkan Pak Jon, jadi kalau tanah itu memang nanti dikuasi oleh negara, jadi tidak bisa ke swasta. Bahwa tanahnya nanti bisa dikerjasamakan atau dijual ke pihak ketiga yang tentunya bisa dilakukan, tapi yang mengelola tanah atau yang menguasai tanah itu adalah pemerintah. Kalau boleh kami lanjutkan yang Pina tadi Pak Jon tahun 2014 eh 2018 mohon maaf tahun lalu karena Pina itu pada intinya melakukan fasilitasi pembiayaan sampai *financial close* khususnya *equity financing*. Untuk tahun lalu kita berhasil melakukan *financial close* untuk sebelas projek berbagai macam projek infrastruktur tapi juga ada yang energi dan perkebunan senilai projeknya adalah 3,3 milyar US dollar. Untuk 2019 targetnya adalah 6 milyar US dollar, tapi kami sendiri tentunya bekerja lebih keras karena yang di pipeline ini masih lima puluh setengah milyar US dollar. Jadi memang bertahap karena kita juga ingin mendorong tidak semua investasi harus dilakukan dengan dept financing dengan hutang tetapi bisa juga dengan skema equity. Dan satu lagi kami juga melakukan fasilitasi bersama antara Pina dengan PPP sehingga projek PPP pun bisa memanfaatkan fasilitasi yang kami lakukan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Jon juga yang terkait juga dengan Pak Johnny Plate mengenai B20, B30 dan B100. Kalau B20, B30 pada intinya biodiesel. Jadi itu untuk mengurangi import minyak diesel yang biasa dipakai apakah untuk solar

di kendaraan bermotor maupun untuk pembangkit listrik. Dan itu kalau dilihat kapasitas dari produksi sawit di Indonesia khususnya CPO nya itu memang perkiraan sekarang maksimalnya bisa sampai B30.

Nah pertanyaannya apa itu B100. B100 itu juga berasal dari sawit tapi ada perbedaannya. Jadi dia saya masih kurang paham mengenai teknisnya tapi itu bukan dari CPO nya ya tapi dari ada bagian kalau mereka menyebutnya IPO, ya bukan CPO tapi IPO. Nah dari IPO tersebut ditambah dengan dicampur dengan katalis, dan katalisnya kebetulan dibuat oleh ITB (Institut Teknologi Bandung) itu bisa menghasilkan yang namanya green fuel, jadi tidak hanya diesel tapi green fuel green diesel dan bahkan sampai green avtur. Jadi intinya ini bisa menjadi kaya fuel substitution dari bensin atau dari BBM. Saat ini tahapannya selain apa kalau risetnya katalisnya sudah dibuat oleh ITB, katalis itu untuk mencampurnya Pak. Nah sekarang yang dilakukan adalah uji coba di kilang Pertamina. Kalau ngga salah di Dumai dan Plaju itu sedang dilakukan percobaan, ya supaya nanti si green diesel green fuel itu bisa diolah di kilang, ya baik kilang terutama kilang-kilang Pertamina yang sudah tua. Kan yang Plaju terutama itu adalah dibuat sejak jaman Belanda, dan itu bisa difungsikan lagi terutama untuk green fuel. Dan kalau ini nanti berhasil artinya secara ekonomi itu masuk terutama mengenai harga maka B100 itu bisa terjadi, karena artinya kita tidak perlu menggunakan yang namanya BBM yang sifatnya fosil fuel.

Nah tadi ada pertanyaan juga saya ingat dan ini cocok dengan ide green diesel. Kalau bio diesel itu kebanyakan kan berasal dari perkebunan sawit yang besar, perusahaan. Nah kalau green diesel ini targetnya adalah menggunakan output atau hasil dari perkebunan rakyat, ya kebun-kebun yang dimiliki oleh petani-petani sawit yang kalau kita bisa mengembangkan B100 itu memang mereka harus memperbaiki dulu produktifitasnya karena dikhawatirkan nanti kalau menggunakan produktifitas mereka sekarang takut tidak cukup untuk menjadi bahan suplay untuk green diesel. Karena itu sambil kita menyiapkan B100 nya green dieselnya kita siapkan juga perbaikan produktifitas dari sawit rakyat khususnya replanting dan juga pemberian benih yang lebih tepat. Nah kemudian tadi untuk Pak Refrizal saya sudah sebagian menjawab mengenai masalah pemindahan ibukota ya yang dengan tujuan dan dengan semangat untuk meminimumkan penggunaan APBN. Dan tentunya kita ingin mendorong peran swasta BUMN dan juga KPPU, dan utamanya adalah secara konseptual kita ingin mengurangi beban, ya beban di Pulau Jawa terutama. Dan kita juga melihat pengalaman negara lain dengan memindahkan pusat pemerintahan yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan maka ada pembagian beban, ya meskipun tentunya tidak menjadi pengganti Jakarta tetapi paling tidak ada kegiatan ekonomi yang kemudian muncul di seputaran wilayah ibukota tersebut.

Dan pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, ya tinggal penentuan lokasinya. Kemudian untuk Pak Hari Purnomo karena tidak hadir mungkin kalau boleh saya skip. Untuk Bu Elviana, yang Ibu Elviana baca waktu itu di lampiran itu adalah sample Bu sample pembahasan Musrenbangnas. Tapi kami juga sudah melihat bahwa cukup banyak rencana pembangunan jalan ya dan juga Bandara yang ada di Jambi, ya Bandara Muarabungo memang diusulkan untuk dikembangkan karena dianggap bisa menyelesaikan masalah. Satu lagi adalah pengembangan pelabuhan Bu Elviana, pelabuhan

pengganti Muara Sabak ya Ujung Jabung kalau ngga salah. Itu yang nantinya juga menjadi salah satu prioritas, karena kami melihat salah satu problem di Jambi kemarin Jambi sangat tergantung pada komoditas. Dan kita tentunya kita berharap komoditas-komoditas yang dihasilkan di Jambi dapat bisa diekspor atau bisa dikirimkan ke tempat lain ya sehingga kebutuhan pelabuhan dan juga jalan ini menjadi penting. Jadi intinya tidak ada cerita bahwa Jambi itu dilupakan dalam konteks pembangunan terutama konektivitas yaitu jalan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Pimpinan ijin sebentar.

Pak Menteri terima kasih banyak penjelasannya karena kemarin memang pas Musrenbang itu saya ngga diundang sama Gubernurnya gitu, karena masa-masa kampanye itu Pak, anaknya juga maju DPD gitu. Jadi kita ngga diundang saya ngga bisa ngintip, ya begitulah kira-kira, tapi ngga apa-apa.

Pak Menteri memang kalau Pelabuhan Ujung Jabungnya bagus tapi semua komoditas Jambi itu melewati jalan utama dari yang kemarin saya bilang Muaro Bungo sampai ke Provinsi Jambi. Saya mohon di tahun 2020 itu benar-benar terealisasi Pak Menteri. Jalan antara Muaro Bungo dan urat nadinya Jambi itu, itu jalan negara bukan jalan provinsi begitu. Sudah berbagai upaya misalnya diangkut lewat sungai nda bisa, semua Sawit, Batubara semuanya lewat situ. Itu yang saya ingin sampaikan dan benar-benar itu mohon terealisasi.

Terima kasih Pak Menteri.

**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:**

Baik Bu Elviana jadi memang dengan skema perencanaan yang kami lakukan yang sifatnya integred dan spasial maka otomatis kalau kita punya proyek misalkan membangun atau mengupgrade pelabuhan maka itu harus satu paket dengan konektivitasnya baik listrik maupun jalan. Nah kemudian tadi untuk Pak Johnny Plate tapi Pak Johnny sudah keluar dan kami sudah bahas tadi mengenai B100 ya Pak Johnny sudah ngga ada ya. Kemudian tadi Pak Andreas kami sudah mengadres yang mengenai Malang, tapi kalau yang E-Riaunya kami ya yang bikin E-Riau yang sebelah saya Pak yang dari BPS. Targetnya membuat tabel E-Riau, saya ngga tahu yang terakhir mau berapa tahun berapa, oh 2016. Karena bikin E-Riau itu kompleks sekali Pak, Pak Andreas, tapi kalau menyelesaikan masalah Malang tadi kami melihat penyelesaian dengan pendekatan metropolitan itu akan sangat pas. Karena kami melihat di Malang itu kan Kabupaten Malang Kota Kanjuruhannya kan sudah mulai berkembang juga. Kemudian Kota Batu juga sudah mulai macet dengan pariwisatanya, Malang demikian juga. Jadi kami melihat sebenarnya Malang, Kota Batu sama Kanjuruhan Kabupaten Malang itu seperti satu wilayah. Nah ini yang harus diselesaikan dengan pendekatan metropolitan. Jadi memang sifatnya harus lintas daerah dan harus punya legal basis untuk kerjasama antar daerah terutama untuk pemakaian APBD. Ya tadi cerita

kenapa apa namanya MRT itu berhenti di Lebakbulus karena kalau lewat Lebakbulus maka APBD DKI tidak bisa dipakai untuk membangun MRT di Ciputat misalkan karena itu adalah tanggung jawabnya Tangerang atau Kota Tangerang Selatan. Nah kemudian untuk terakhir Pak Ketua

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Pimpinan, Pimpinan.

**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:**

Oh ya.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Masagena adalah jangan sampai potensi ekonomi tersebut terkendala oleh wilayah administratif, itu saja pointnya seperti itu.

**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:**

Betul sekali Pak Andreass, karena dari pertama dulu saya belajar ekonomi regional kuncinya adalah tidak ada yang namanya batas administrasi, yang ada adalah batas ekonomi. Itu yang harusnya menjadi perhatian. Kemudian untuk Pak Melchi yang pertanyaan mengenai ini semacam apakah top down atau bottom up. Kalau saya boleh simpulkan ini Pak Ketua jadi di ekonomi Indonesia ini dengan pertumbuhan katakan kita melihat 2018 kemarin pertumbuhan kita 5,17. Pada saat yang sama kalau ngga salah Jawa tumbuh 5,3 atau 5,4. Nah artinya kita melihat ada kesamaan pola antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Kenapa, karena pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa itu strukturnya mirip dengan nasional. Di nasional Pak Ketua tahu yang paling besar kontribusi PDB nya adalah manufaktur, nomor dua pertanian, nomor tiga perdagangan, ya tiga besarnya. Nah Jawa itu merefleksikan seperti itu persis, ya dimana tiga sektor itulah yang mendominasi Pulau Jawa. Nah ini yang membuat Pulau Jawa beda misalkan dengan Sumatera dan Kalimantan yang kontribusi manufakturnya masih kalah dibandingkan sektor baik pertanian maupun sektor misalkan pertambangan.

Dan kebetulan pertanian dan pertambangan itu adalah komoditas yang harganya itu selalu naik turun. Nah jadi kalau dikatakan tadi daerah sebagai penghambat atau pendorong saya melihat bahwa kalau daerah itu sudah mengikuti pola seperti yang seharusnya kita inginkan artinya yang pola yang bisa tumbuh cepat maka dia menjadi pendorong, seperti Jawa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah kemudian daerah-daerah lain kalau kita lihat yang selalu menjadi terkecualian adalah Sulawesi. Sulawesi itu selalu tumbuh lebih tinggi secara nasional, Cuma karena dia kontribusinya masih kecil maka kontribusi ke nasionalnya juga belum terlalu terlihat. Tetapi paling tidak model di Sulawesi ini cocok untuk dikembangkan di Kalimantan maupun Sulawesi, yaitu perlu ada industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan industrialisasi itu atau pabriknya paling tidak itu sebaiknya berlokasi di wilayah itu juga. Jadi kalau Sulawesi misalnya punya Nikel maka pabrik yang di

Morowali itu mengolah Nikel. Dia tidak kemana-mana dia tidak lari ke Jawa tidak lari ke daerah lain, ya nilai tambahnya. Demikian juga harusnya turunan Sawit, turunan Karet di Sumatera itu harusnya pabriknya lebih banyak di Sumatera, karena itu ada kawasan industri say mangke yang fokusnya memang lebih kepada turunan dari Sawit misalkan. Dan di Kalimantan demikian juga. Kalimantan ini sekarang mulai mengembangkan misalnya Alumina, karena banyak Bouksit di Kalimantan Barat, sehingga akan lebih banyak didorong yang namanya Alumina dan bahkan kalau Inalum harus bikin pabrik kedua lokasi yang kedua yang terbaik adalah di Kalimantan karena Bouksitnya dan Aluminanya ada di Kalimantan. Jadi kira-kira itu bisa menjelaskan kenapa ada beberapa daerah yang kelihatannya sejalan dengan ekonomi nasional ada yang lebih fluktuatif dibandingkan yang lain. Jadi kuncinya kembali lagi kita harus mulai mengurangi ketergantungan kepada sumberdaya alam.

Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, dari Bank Indonesia.

#### **GUBERNUR BANK INDONESIA:**

Kalau, terima kasih Bapak Pimpinan.

#### **Bapak Pimpinan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Ada beberapa yang dapat kami tambahkan terkait tiga hal. Satu mengenai pertumbuhan ekonomi, dua mengenai nilai tukar, dan yang ketiga mengenai pendalaman stand mengenai kebijakan Bank Indonesia. Satu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti kami sampaikan Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2020 kisarannya adalah 5,1 sampai 5,5 persen. Ada beberapa pertanyaan juga dari Pak Ketua sendiri di tengah ekonomi dunia yang sedang menurun mengapa ekonomi Indonesia diproyeksinya tumbuh meningkat. Pak Jon Erizal juga menanyakan kisarannya kenapa terlalu lebar. Pak Hari Purnomo juga menanyakan kenapa prediksi pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia lebih pesimis daripada perkiraan dari pemerintah didalam APBN. Bapak Pimpinan didalam kami memperkirakan kisaran pertumbuhan 5,1 sampai 5,5 persen di tahun 2020 kami mempertimbangkan tiga faktor. Satu bahwa pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas ekspor kita akan membaik. Sebagaimana kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan naik dari 3,3 persen pada tahun 2019 menjadi 3,4 persen pada tahun 2020.

Demikian juga harga komoditas ekspor Indonesia yang tahun 2019 ini turun tahun depan diperkirakan akan naik menjadi positif. Oleh karena itu dengan pertimbangan ini ada peluang dan karenanya kami memperkirakan bahwa ekspor Indonesia pertumbuhannya akan lebih baik dari tahun ini, kami perkirakan 4,4 sampai 4,8 persen, meskipun memang tingkat pertumbuhan ekspor yang kami perkirakan memang lebih rendah dari pemerintah antara lain

memang berkaitan tadi bahwa tahun ini rendah dan tahun depan itu terlalu sulit untuk meningkatkan lebih tinggi. Yang kedua bahwa konsumsi swasta itu masih akan tumbuh cukup baik.

Demikian juga investasi swasta itu juga akan tumbuh merespon konsumsi swasta maupun kinerja ekspor Indonesia. Jadi kalau dalam konteks ini arah dari perkembangan konsumsi dan investasi swasta itu sejalan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Faktor ketiga yang kami gunakan sebagai dasar bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang membaik itu juga termasuk karena berbagai respon kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dan juga dengan sinergi dengan pemerintah dan OJK. Sebagaimana telah kami sampaikan Bank Indonesia akan terus menempuh sejumlah kebijakan yang akomodatif didalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecukupan likuiditas kami akan pastikan untuk ada dan juga mendorong penyaluran kredit perbankan. Demikian juga kami akan terus melakukan relaksasi kebijakan makro Bank Indonesia, pendalaman pasar keuangan maupun sistem pembayaran. Terkait dengan kebijakan suku bunga memang kami masih melihat bagaimana kondisi pasar keuangan global yang sekarang masih tidak pasti dan juga melihat kinerja neraca pembayaran triwulan kedua ini untuk nanti bisa mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif yang memang ruangnya terbuka sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Koordinasi dengan pemerintah juga akan terus dilakukan seperti tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan maupun Pak Bambang. Jadi dari 5,1 sampai 5,5 berarti titik tengahnya adalah 5,3. Nah kisarannya itu apakah ada resiko ke bawah dan kemudian juga resiko ke atas. Resiko ke bawah bisa terjadi kalau memang perang dagang ini akan terus berkelanjutan dan memburuk, sehingga pertumbuhan ekonomi dunianya tidak lebih tinggi dan juga upaya kita mendorong ekspor juga itu semakin sulit. Itu adalah resiko yang bisa membawa pertumbuhan ekonomi mengarah ke lebih rendah dari titik tengah perkiraan kami 5,3 persen. Apakah bisa lebih tinggi tentu saja seperti tadi adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekspor, kemudian mendorong PMA dan juga berbagai kebijakan-kebijakan itu akan menentukan. Apakah memang mampu mempetigasi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia akibat dari perang dagang. Jadi itu adalah kisaran-kisaran kenapa kisarannya 5,1 sampai 5,5. Kisaran itu menunjukkan memang resiko-resiko ketidakpastian yang memang muncul dari sekarang ke tahun depan. Saya kira itu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Mengenai nilai tukar kami perkirakan bahwa tahun depan rata-rata nilai tukar rupiah di tahun depan adalah 13.900 sampai dengan 14.300. Ada empat faktor yang mendukung perkiraan nilai tukar tadi. Satu adalah prospek ekonomi Indonesia yang akan membaik, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inflasi yang lebih rendah dan karena konduktivitas yang terjaga, sekitar dua setengah sampai tiga persen dari PDB dan tentu saja dari sektor keuangan yang pertumbuhan kredit juga akan terus membaik. Pertumbuhan ekonomi atau prospek ekonomi yang membaik ini tentu saja akan mendorong sentimen yang positif bagi aliran masuk modal asing ke Indonesia baik investasi portfolio maupun PMA. Itu adalah hal yang pertama. Yang kedua memang kami perkirakan kondisi pasar keuangan global itu setidaknya akan lebih baik dari tahun ini. Perang dagang diperkirakan akan mereda demikian juga kebijakan

bank-bank sentral di berbagai negara termasuk FED yang lebih dofis. Bahwa semula FED diperkirakan akan menaikkan suku bunga tapi perkiraannya tidak menaikkan suku bunga bahkan ada kemungkinan FED itu menurunkan suku bunga.

Demikian juga di sejumlah bank sentral lain, sehingga ini juga akan memberikan suatu faktor positif atas masuknya aliran modal asing masuk sehingga menjaga stabilitas eksternal Indonesia. Faktor yang ketiga adalah sinergi dari berbagai kebijakan baik yang ditempuh oleh Bank Indonesia, Pemerintah maupun juga dengan OJK. Tadi sudah dijelaskan terus kami bersinergi bagaimana memperbaiki defisit transaksi berjalan dan mendorong arus masuk modal asing dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah berkaitan dengan mendorong ekspor, pariwisata, mengurangi import, mendorong infrastruktur, perbaikan iklim investasi yang tadi sudah dijelaskan. Dari Bank Indonesia sendiri juga kami akan terus mengkalibrasi bagaimana bauran aja kebijakan moneter, makro ...(suara tidak jelas) pendalaman pasar keuangan dan ...(suara tidak jelas) tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu adalah faktor ketiga kenapa kami memperkirakan nilai tukarnya akan cenderung stabil dan cenderung menguat. Faktor yang keempat adalah memang pasar valuta asing kita jauh lebih baik dibanding yang dulu-dulu. Dengan adanya berbagai instrument yang sudah kami kembangkan apakah terkait dengan swap domestik non delivery forward maupun juga kami akan kembangkan interesty swap maupun berbagai pasar yang lain termasuk juga peraturan mengenai market operator, CCP itu yang kami kembangkan, sehingga pasar valasnya itu akan bergerak lebih baik. Empat faktor ini yang mendorong kami kenapa memperkirakan di tahun 2020 kami memperkirakan nilai tukar akan membaik dengan kisaran 13.900 sampai dengan 14.300. Hal yang ketiga yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pertanyaan Pak Andreas apa yang ditunggu oleh Bank Indonesia. Itu konteksnya terkait dengan kebijakan suku bunga. Benar bahwa didalam RDP terakhir kami sudah menyampaikan kepada publik didalam release kami Bank Indonesia masih mencermati kondisi pasar keuangan global dan neraca pembayaran Indonesia dalam mempertimbangkan terbukanya ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi didalam negeri.

Jadi kalau mempertimbangkan inflasi yang rendah pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong memang kami sudah tahu bahwa ada ruang untuk menurunkan suku bunga. Itu kan esensinya seperti itu. Cuma masalahnya kita perlu melihat bagaimana kondisi pasar keuangan global dan neraca pembayaran. Sampai saat ini kita sudah berdiskusi dari minggu lalu dan sekarang bahwa sehingga saat ini kondisi pasar keuangan global itu kan masih diliputi oleh ketidakpastian. Apakah terkait dengan perang dagang, breaksit, geopolitik yang lain yang memang sewaktu-waktu ini bisa kemudian membuat pembalikan arus modal asing masuk. Dan karenanya juga ini memberikan resiko bagi pembiayaan dari neraca defisit transaksi berjalan. Itu yang kami maksud kenapa kami masih mencermati ketidakpastian pasar keuangan global. Yang hal yang lain juga karena memang biasanya di triwulan dua Pak Andreas kita tahu secara pola musimannya defisit transaksi berjalan itu biasanya lebih tinggi dari triwulan-triwulan yang lain. Apakah terkait dengan

neraca perdagangan maupun juga pembayaran hutang, repatriasi deviden, bunga dan itu kan memang di triwulan dua itu biasa. Defisit transaksi berjalan secara pola musiman itu lebih tinggi, dan karena itu kenapa kalimat menjaga memastikan stabilitas eksternal itu kami masukan kesana.

Itu yang kenapa di RDP rapat dewan terakhir kami masih mempertahankan suku bunga. Tentu saja memang kami harapkan di smester dua 2019 ini ketidakpastian pasar keuangan global itu diharapkan akan mereda. Demikian juga di triwulan-triwulan mendatang di smester dua ini defisit transaksi berjalannya akan menurun, dan juga arus modal asing akan terus masuk dan itu akan mendukung stabilitas eksternal ekonomi Indonesia. Ini yang barangkali yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pertanyaan Pak Andreas. Tapi meskipun kebijakan suku bunga memang kami harus memastikan mengenai kondisi eksternal maupun pasar keuangan global tadi bukan berarti memang Bank Indonesia tidak pro grot. Sebagaimana kami sampaikan berkali-kali bahwa Bank Indonesia mempunyai instrument-instrument lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Instrument-instrument itu apa, yang pertama bagaimana likuiditas di pasar uang dan di perbankan itu kami pastikan itu lebih dari cukup melalui ekspansi operasi moneter maupun beberapa penyesuaian yang sudah kami lakukan mengenai giro wajib minimum. Dan kami juga terus koordinasi dengan OJK untuk didalam konteks penyaluran kredit maupun suku bunga ini. Ini yang menjelaskan kenapa langkah pelonggaran yang kami likuiditas yang kami lakukan dan upaya-upaya Pak Wimboh didalam meningkatkan efisiensi perbankan itu menjelaskan kenapa sejak tahun lalu sampai sekarang suku bunga kredit itu tidak naik tapi malah turun. Suku bunga kredit turun sekitar 24 basis point menjadi sekarang itu 10,84 persen dan juga suku bunga deposito naiknya juga tidak terlalu besar 106 basis point menjadi 6,86 persen dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang kami lakukan sekitar 1,75 basis point. Jadi kami menaikkan suku bunga tapi suku bunga kreditnya adalah tidak naik tapi turun dan kenaikan suku bunga deposito itu lebih rendah. Untuk mendorong pembiayaan ekonomi sebagaimana tadi kami sampaikan kami juga menempuh kebijakan makro boleh saja akomodatif antara lain kelonggaran ratio finding to financing to finding ratio menjadi 84 sampai 94 persen. Demikian juga kebijakan sistem pembayaran pendalaman pasar keuangan dan juga koordinasi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Barangkali tiga hal itu Pak Ketua kalau mengenai yang lain mengenai inflasi maupun mengenai pendalaman pasar keuangan jawaban tertulisnya sudah kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu barangkali mungkin tidak akan saya sampaikan secara lisan.

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak OJK.

**KETUA DK. OJK:**

*Bismillahirrohmanirrohim.*



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang kami hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,  
Yang kami hormati juga Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,  
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Dewan Komisiner OJK yang tentunya mensupport semua yang akan kami sampaikan ini. Dan juga yang kami sampaikan ini sebenarnya hanya beberapa point yang tentunya untuk mensupport yang tadi disampaikan Bu Menteri Keuangan, Pak Bambang Brodjo dan Gubernur Bank Indonesia. Dan juga ini dengan asumsi-asumsi yang pertama bahwa untuk mendukung investasi yang jumlahnya 5.800 triliun sebagaimana disampaikan Bu Menteri Keuangan. Yang kedua juga tadi juga sebagaimana pertanyaan Anggota Komisi XI kemarin mengenai bagaimana pemerataan pendapatan yang pusat daerah. Yang ketiga juga Bu Menteri Keuangan bagaimana memperluas tax base ya. Dan juga bagaimana orientasi ekspor dan juga substitusi import. Bagaimana nanti kebijakan sektor keuangan itu ramah kepada lingkungan. Dan juga kebijakan-kebijakan tersebut dalam koridor untuk mendukung stabilitas sistem keuangan yang tentunya nanti kita koordinasi dalam SSK bersama Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia yang tadi sudah disebut bahwa bagaimana kita memperluas investor base, memperluas emiten dalam rangka memperluas memperdalam sektor keuangan dan juga membangun infrastruktur pasar. Yang penting ini nanti adalah merupakan acuan-acuan kita bagaimana membuat kebijakan di sektor keuangan.

**Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi XI yang kami muliakan.**

Sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,6 persen dibutuhkan investasi pembiayaan sebesar 5.803 triliun sampai dengan 5.823 triliun. Dari kebutuhan tersebut kami sampaikan bahwa untuk sektor perbankan ini dapat tumbuh sekitar 10,2 persen atau sekitar dalam nominal 594 triliun. Dan pasar modal dapat tumbuh 3,2 persen atau sekitar 186 triliun. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya di 2019 ini, ini sudah kita targetkan 559 triliun. Dan ini pertumbuhan ini rangenya sekitar 10 sampai 12 persen yang memang ada revisi dari bisnis ... perbankan. Terakhir itu direvisi pertumbuhan kredit perbankan itu 9 sampai 11 persen. Sedangkan untuk 12 sampai 16 persen yang jumlahnya tadi dapat kami sampaikan sekitar 594 ini kami optimis bisa mencapai itu. Dan juga kalau berkaitan dengan di pertumbuhan di pasar modal ya mungkin kalau pembiayaan barngkali tidak ada masalah karena kontribusinya cukup kecil dan potensinya cukup besar. Sedangkan di pasar modal di 2019 ini, ini kami optimis bisa mencapai total 176 triliun. Sedangkan kalau target 2020 ini kalau tadi sebesar 3,2 persen ini jumlahnya 186 triliun karena ini masih dalam target range kami. Bahkan kami kalau nanti yeardnya bisa turun kondisinya membaik ini kita bisa optimis lebih besar dari itu. Jadi dengan target-target yang tadi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang

ditargetkan Ibu Menteri kami yakin bisa tercapai. Nah tentunya kenapa demikian, kami yakin dari perbankan dari permodalan tidak ada masalah. Car perbankan kita mencapai 23,8 persen, apalagi asuransi cukup besar dimana jauh dari threshold 120 persen. Dan dari likuiditas perbankan kami mempunyai ekse risep sebesar 525 triliun. Jadi kami tentunya dengan multi player yang cepat kami bisa membiayai yang tadi targetnya di atas 500 triliun. Dan juga ratio likuiditas lainnya indikator-indikator lainnya cukup tinggi di atas threshold ya. Nah diantaranya adalah AL prind CD ya yang sebesar 91,6 persen dimana thresholdnya 50 persen, dan juga likuidate car ratio (LCR) sebesar 197 persen dimana thresholdnya 100 persen.

Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari segi kemampuannya kita tidak ada masalah. Untuk di 2020 kalau katakanlah kita full speet demandnya ada ya. Bahkan perbankan ini bisa menyalurkan kredit sampai di atas 770 triliun, yaitu rangenya 771 sampai 875 triliun. Dan sehingga pasar modal juga sama apabila demandnya ada kita mempunyai kapasitas yang cukup besar. Sehingga permasalahannya adalah strategi OJK bagaimana mengcreat dari demand untuk kredit maupun demand di pasar modal ini, ini yang lebih penting. Kami mendukung tadi berbagai kebijakan dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia. Yang pertama kami harus targeted kepada sektor-sektor yang potensinya besar mendorong ekspor, menyerap tenaga kerja, mengcreat take base yang luas, ramah lingkungan dan juga tidak menimbulkan distorsi pasar. Nah inilah yang sebenarnya kebijakan OJK yang kami siapkan, jadi bukan hanya sekedar mencapai target sebagaimana tadi yang dihitung, tapi bagaimana sektoralnya prioritasnya yang harus kita gaet kepada industri perbankan dan pasar modal agar para peminjam maupun emiten-emiten tadi berorientasi kepada tadi yang sudah kami sampaikan tadi ekspor, substitusi import, menyerap tenaga kerja, pemerataan pusat daerah dan juga take base. ... setelah kami lihat di lapangan. Ada beberapa memang kendala SDM, kendala teknologi. Dan ini adalah dan kendala kompetitifnes karena terutama di manufaktur ini mesin-mesin kita terutama tekstil itu adalah mesin-mesin yang difasilitasi oleh pemerintah lema belas dua puluh tahun yang lalu dengan insentif ya pembebasan pajak waktu import mesin. Nah sekarang ini tentunya sudah ngga kompetitif lagi, bahkan sekarang industri tekstil ini sudah ngga berbasis kapas, ya harus berbasis rayon karena sekarang ini ngga kompetitif lagi terlalu mahal kalau berbasis kapas. Disamping itu kita masih import untuk kapas. Untuk itu kami kebijakannya akan mendorong ya pembiayaan di perbankan maupun di pasar modal target-target sektoral, ya diantaranya kami memberi contoh saja perikanan laut. Perikanan laut ini potensinya cukup besar, dan pasar ekspor cukup besar.

Dapat kami sampaikan beberapa angka yang kami rujuk ya potensi perikanan Indonesia cukup besar mencapai 65 juta ton per tahun. Ya ini adalah sumbernya dari Perusahaan Umum Perikanan Indonesia ya. Dan juga 7,9 juta penduduk miskin bergantung pada laut. Dan juga 6,7 ton produksi perikanan laut ini yang sudah terjadi di 2018. Nilai ekspor kita 4,9 milyar di tahun 2018. Dan penerimaan pajak ini mencapai sekitar 1,1 triliun. Nah ini potensinya masih besar kita kembangkan lagi, namun memang ada beberapa kendala yang harus kita tekel diantaranya tadi nelayannya harus kita andhase dengan fokisno, ya investasi besar kapal yang tentunya nanti menjadi penyangga untuk ekspor ya, dan ada kostroreganya ya dan juga sebagai off taker nanti

pengendalian kualitas dan modal kerja nelayan. Tentunya nanti itu bisa kita deploy dengan KUR yang khusus kita buat untuk nelayan. Pariwisata yang potensinya besar yang sudah kita canangkan akan kita coba berdasarkan KEK ya kawasan ekonomi khusus pariwisata nanti kendalanya apa tentunya terutama dari pembiayaan akan kami siapkan, apakah perlu dorongan-dorongan tertentu yang. Dan tentunya ini diantaranya ada infrastruktur connectivity ini masih terbatas. Dan juga paket-paket wisata juga terbatas. Nah inilah potensi-potensi ini yang nanti kami sepakat bahwa sektor swasta yang harus di front line apabila ada kendala swasta untuk memasuki di sektor-sektor itu tentunya pemerintah bisa masuknya. Diantaranya juga sektor agribisnis ya ini juga akan menjadi perhatian kita akan nanti targeted berbagai proyek akan kita biyai, diantaranya termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit ini ada kendala replanting dan sebagainya. Ini mungkin ada beberapa kendala diantaranya bagaimana pembiayaan selama empat tahun untuk replanting ini karena belum menghasilkan ini pembiayaannya darimana. Nggak mungkin perbankan ini memberikan pembiayaan di replanting tanpa ada pembayaran bunga maupun instorment. Ini adalah isu-isu yang harus kita lakukan ya. Dan juga di sektor agribisnis ini isu lingkungan ini sangat penting sehingga kami nanti ada berbagai skim pembiayaan yang ramah lingkungan yang kita ciptakan baik itu Sukuk yang ramah lingkungan maupun pembiayaan yang ramah lingkungan termasuk blandis financenya. Di sektor manufakturing sama sudah kami sampaikan tadi diantaranya ada tekstil ya ada otomobil ya itu potensinya cukup besar ya tadi tekstil secara khusus sudah kami sebut kayaknya perlu peremajaan mesin.

Bagaimana insentif Bapak yang kita berikan nanti tentunya kita bersama-sama dengan kementerian terkait untuk membahas ini. Lantas juga mining diantaranya Batubara, Nikel dan Emas maupun Tembaga ini juga ada beberapa hal yang potensinya besar ya kita punya angka-angkanya dan kendalanya itu nanti kita akan kita bicarakan bersama dengan kementerian terkait. Selain kita mendorong leding sektor tadi kita juga tadi sudah disampaikan Pak Gubernur, Bu Menteri Keuangan dalam pembiayaan ini kita memperluas basis untuk pendalaman pasar keuangan, terutama kita perlu menjaga likuiditas pasar agar nanti kalau ini terjadi sangat agresif perbankan maupun sektor keuangan tidak kekurangan likuititas. Ini adalah bagaimana mengharmoniskan sumber-sumber di dalam negeri, sumber di luar negeri dan tidak menimbulkan krodng out. Ini adalah nanti kita bertiga dalam KSS akan selalu membahas ya agar tujuan mendorong pembiayaan tadi tercapai namun juga tidak menimbulkan efek instability di sektor keuangan.

Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kami juga akan fokus bagaimana kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar ini harus menjadi strategi kita dalam mendukung pemerataan pendapatan pusat dan daerah. Ya untuk itu kami program-program kredit seperti KUR, hutang mikro dan juga program-program lainnya tentunya akan terus kita dorong dan kita integrasikan kepada proyek-proyek besar tadi. Dan kami akan membuat skim-skim khusus bersama pengusaha dan perbankan agar skim-skim yang kita buat tadi menyerap tenaga kerja ramah lingkungan dan juga orientasi ekspor. Itulah yang beberapa hal yang dapat kami sampaikan bagaimana strategi kita tentunya kami nanti dalam RDP khusus dengan OJK kami siap untuk menjelaskan lebih detail.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami terima kasih beberapa hal tadi mudah-mudahan bisa membeikan pemahaman yang lebih jelas bagaimana nanti strategi kami di sektor keuangan.

Demikian, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Dari BPS silakan.

**KEPALA BPS:**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.**

Hanya ada tiga pertanyaan yang terkait dengan BPS dan tadi sebagian besar sudah dijawab oleh Pak Bambang. Saya akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama dari Pak Jon Erizal. Pak Jon Erizal mengingatkan bahwa empat target pembangunan didalam Undang-Undang APBN ini sangat penting, dan kalau tidak tercapai berarti melanggar undang-undang. Karena itu BPS diminta untuk lebih transparan dalam menyampaikan mekanisme penghitungan metodologinya. Terima kasih masukannya Pak Jon, perlu saya sampaikan bahwa seluruh metodolgi yang digunakan BPS untuk menghasilkan sebuah data baik itu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan dan sebagainya itu selalu mengacu kepada metodolgi yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB. Seluruh negara harus menepati hal tersebut supaya ada keterbandingan antar negara. Metodologi tersebut selalu di upload BPS di webnya yang pertama dan yang kedua selalu dicantumkan didalam publikasi, misalnya metodologi untuk kemiskinan dan gini ratio bisa dilihat ada contoh disana dalam publikasi yang berjudul penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia. Selalu ada satu bab khusus yang berisi catatan teknis, berisi konsep definisi metodologi yang digunakan termasuk formula-formula yang mungkin bagi orang awan agak dijauhi begitu karena agak ribet. Dan biasanya yang mengakses ini adalah teman-teman dari akademisi maupun peneliti, bahkan mereka melakukan replikasi untuk mencek penghitungan BPS. Untuk para pengguna data yang ingin penjelasan general biasanya mereka lebih suka untuk datang ke BPS. Disana kita mempunyai unit khusus yang namanya pelayanan statistik terpadu dan melakukan diskusi langsung untuk transparansi metodologi ini.

Tetapi intinya BPS sangat transparan mengenai metode yang digunakan dan kedepan kalau memang diperlukan diskusi yang lebih gencar akan kita lakukan. Pertanyaan Pak Jon mengenai kekurangtepatan kemiskinan makro mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bambang jawabannya. Memang masih ada salah satu kendala yang sekarang ini sedang kita diskusikan antara

Kemensos dengan stakeholder yang lainnya. Kadang-kadang updating datanya di lapangan cepat tapi penggantian kartunya kadang-kadang masih memakan waktu. Jadi ada oleg yang agak lama dan itu yang sekarang sedang diskusikan bagaimana memangkas prosedur itu supaya penggantian target sasaran menjadi lebih cepat. Mudah-mudahan bisa diwujudkan segera. Pertanyaan kedua datang dari Pak Refrizal yang menanyakan seberapa besar dampak harga tiket pesawat terhadap inflasi dan tingkat okupansi hotel. Jadi minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa fenomena kenaikan harga tiket pesawat mulai bulan Januari 2019 ini tidak biasa. Biasanya kenaikan tiket pesawat hanya memberikan andil kepada inflasi di bulan Ramadhan dan Lebaran dan satu lagi di bulan Desember. Dan biasanya sumbangannya kepada inflasi hanya sekitar 2 sampai 4 persen. Tetapi mulai Januari 2019 andil angkutan udara pada inflasi cukup besar. Dan pada bulan Mei 2019 ini andilnya sudah mencapai 9 persen, jadi lebih dari dua kali lipat. Dampaknya bisa dilihat dari penurunan jumlah penumpang angkutan udara pada bulan April 2019 ini jumlah penumpang angkutan udara turun sebesar dua puluh delapan setengah persen dibandingkan tahun yang lalu. Kemudian kalau kita lihat tingkat okupansi hotelnya juga mengalami penurunan yang signifikan dari 57,4 ke 53,9. Jadi dampaknya memang agak signifikan Pak Refrizal, dan saya percaya pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk mengatasi persoalan harga tiket pesawat.

Yang terakhir adalah dari Pak Andreas, perlu saya tambahkan penjelasan dari Pak Bambang tadi memang sekarang ini BPS dan Bappenas sedang menyusun dua statistik baru. Yang pertama adalah metropolitan statistik untuk menghilangkan batas region. Karena kita sadar sekali bahwa batas ekonomilah yang paling penting. Kemudian yang kedua untuk pertama kalinya kita memang sedang menyusun E-Riau Pak Andreas. Jadi E-Riau ini sudah menjadi kebutuhan mutlak, karena kalau kita membicarakan kebijakan pembangunan kedepan kita ngga bisa lagi hanya mengacu kepada pembangunan sektoral tetapi juga harus memperhitungkan aspek geografis atau regionalnya, sehingga kita perlu mengetahui keterkaitan tidak hanya hulu dan hilir tetapi juga aliran produk dari satu region ke region lain. Jadi mulai tahun 2019 ini BPS sedang menyusun E-Riau. Kita mulai dengan membangun tabel input output di 34 provinsi. Kita harapkan selesai pada Desember 2019. Kemudian tahun 2020 itu nanti akan kita sambungkan kedalam bentuk E-Riau kita harapkan selesai pada Desember 2020. Kita harapkan kalau ini selesai perencanaan kebijakan Bappenas antar region akan menjadi lebih bagus. Itu informasi tambahan.

Demikian Bapak Ketua, terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah. Mungkin saya ada satu Bu Menteri. Ini ada surat dari Gubernur Sulawesi Utara tentang PPM pengenaan PPM pada komoditas rempah, Cengkeh dan Pala yang menurut keputusan MK tahun 2016 itu mestinya tidak dikenakan tapi ini masih dikenakan. Itu dari kami Bu.

Baik Bapak-Bapak sekalian mungkin saya putar per fraksi ya untuk kita

mengambil kesimpulan tentang asumsi makro. Kami persilakan dari PDI Perjuangan.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Baik setelah mendengarkan paparan dari semua pihak kami mengambil prinsip bahwa ini adalah fis line, tapi juga harus mencerminkan optimisme dan juga realitas yang ada. Karena itu untuk pertumbuhan ekonomi, ini ris atau satu angka Pak. Untuk pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai dengan 5,4. Kemudian inflasi karena kita lihat bahwa sebetulnya pengelolaan inflasi ini sudah semakin baik jadi sebetulnya risnya bisa lebih dipersempit dua setengah sampai dengan tiga setengah persen. Kemudian tingkat bunga SBN karena kita juga melihat trandnya ke arah dofis dan juga melihat bahwa kita sudah naik grade kita invesment gradenya SNP maka kita menyarankan 5 sampai 5,3. Dan untuk nilai tukar rupiah tadi kita juga menerima penjelasan juga dari Bank Indonesia dan juga kita lihat juga mengenai responsif daripada kebijakan yang ada, kendala pasar keuangan kita 14.000 sampai dengan 14.300.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Golkar.

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Tolong ditayangkan yang tadi dong. Pertama untuk pertumbuhan ekonomi karena ini rans dan base line, tadi kalau PDI menurunkan 5,2 sampai 5,4 biar ransnya sama dengan usulan pemerintah 5,2 sampai 5,5. Iya pemerintah 5,3 ngga, ransnya, caranya caranya. Kalau pemerintah 5,3 sampai 5,6 kalau kita 5,2 sampai 5,5. Inflasi kita bisa ikut asumsi pemerintah. Tingkat suku bunga 5 sampai 5,3. Nilai tukar 14.000 sampai 14.500.

**KETUA RAPAT:**

SBN 5 sampai 5,3 ya. Baik, Gerindra.

**F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan mitranya Komisi XI yang saya hormati.**

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pimpinan pada rapat kali ini.

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Maaf Pimpinan. FPG itu 5,2 sampai 5,5 itu.

## **KETUA RAPAT:**

Oh masih ada koreksi, oke.

## **F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):**

Yang pertama Pimpinan, kita membahas kerangka makro ini jauh hari sebelumnya OJK tidak pernah dilibatkan, tapi berdasarkan hasil rapat internal yang baru lalu kita coba masukan OJK dengan harapan akan mendapat gambaran lebih utuh tentang kondisi ataupun pertumbuhan ekonomi yang akan kita raih. Dari beberapa penjelasan tentunya kita bisa memahami karena ini masih berbicara tentang kerangka, jadi sikap atau sifatnya masih relatif menggunakan rans. Walaupun kita pahami pertumbuhan-pertumbuhan relatif stagnan dari tahun ke tahun. Dan kalau kita berbicara antara satu dengan yang lain kita bisa lihat dari jawaban Bappenas dari jawaban BI dari jawaban Kementerian Keuangan rata-rata masih ada yang sama ada yang ngga sama. Contoh kasus seperti kita ketahui untuk pertumbuhan ekonomi didalam perkiraan Bank Dunia dan IMF penjelasan Menteri Keuangan itu adanya di angka 5,2. Tetapi dari kerangka ekonomi yang diajukan DPR ini sudah ada di 5,3 sampai 5,6. Demikian juga tadi yang kita sampaikan ataupun catatan sebelumnya. Berdasarkan nilai tukar rupiah pemerintah mengajukan antara 14.000 sampai 15.000. Sementara dari kajian Bank Indonesia dikatakan 13.900 sampai 14.300. Masing-masing memiliki catatan, tapi saya kok masih belum melihat terlalu dalam karena dari paparan awal tadi yang kita sampaikan terkait dengan masalah ekspor dan import itu selisihnya masih relatif tinggi juga, walaupun ada sedikit penurunan. Jadi kalau memang pertumbuhan ekonomi stagnan sebenarnya karena berupa kerangka kita bisa serahkan hal ini tapi mungkin kita akan coba mencari yang lebih mendekati.

Kalau tadi di awal diceritakan triwulan pertama atau triwulan ketiga hanya 5,07 sementara kita mau mengambil dengan angka 5,3, menurut OJK kita butuh kurang-lebih 5.800 triliun untuk investasi rasanya terlalu berat. Karena kalau begitu kita masih bergantung kepada arus modal dibanding sektor riil kita begitu. Dengan kata lain untuk Gerindra kami mengambil kesimpulan ransnya itu ada di angka 5,2 sampai 5,4 kisaran yang relatif aman. Dan sementara untuk inflasi kalau kita melihat dari catatan yang ada kami mengambil di angka dua setengah sampai tiga koma lima, karena secara jujur kalau pertumbuhan kita hanya lima persen, sementara inflasi ada di angka dua setengah sampai tiga koma lima berarti pertumbuhan ekonomi kita stage sebetulnya. Dan itu masuk kedalam *middle income trap* kita, dan itu ngga jalan-jalan begitu hanya begini-begini saja. Tingka suku bunga kami masih mengambil catatan yang relatif konservatiflah antara 5 sampai 5,3 ikut catatan dari Bank Indonesia. Terus untuk nilai tukar rasanya ngga berjauhan, kalau tadi Bank Indonesia sampaikan 13.900 sampai 14.300 saya pikir kita antara 14.000 sampai 14.300 masih sofwar.

Kurang lebih demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak.

**F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):**

Inflasi masih tetap di 5 sampai 5,3. Eh sorry sorry inflasi dua setengah sampai tiga setengah.

**KETUA RAPAT:**

SBN, apa mirip kaya PDI. Mau bergabung kayanya, kayanya mau bergabung. Ya silakan Demokrat.

**F-PD (Ir. MARWAN CIK ASAN, M.M.):**

Baik Ketua.

Untuk Poksi Partai Demokrat sejalan dengan apa yang disampaikan dalam pandangan fraksi di Paripurna untuk seluruh indikator makro yang disampaikan inflasi, suku bunga, nilai tukar kita mendukung apa yang disampaikan pemerintah. Begitu juga untuk target pembangunan, tingkat pengangguran, kemiskinan, gini ratio dan IPM dan juga mendukung apa yang disampaikan pemerintah. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi seperti yang juga sudah disampaikan di Rapat Paripurna Demokrat mengusulkan pada angka yang lebih realistis yaitu 5,2 sampai dengan 5,5 persen, mengingat hampir lima tahun ini capaian pertumbuhan ekonomi kita belum pernah melampaui angka 5,2. Dan tahun depan akan banyak tekanan-tekanan yang membuat pertumbuhan ekonomi kita juga akan tertekan. Kita melihat bahwa pemerintah belum ada terobosan yang istimewa untuk mendorong angka pertumbuhan pada angka yang lebih baik dari angka 5,2 sampai dengan 5,5.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Inflasi, inflasi, sama dengan pemerintah ya. Baik, dari PAN ya dari PAN.

**F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Ya terima kasih Pimpinan.

Pertumbuhan ini kalau kami melihat dari PAN lebih kepada bagaimana capaian yang saya menyampaikan beberapa kali stresing terhadap penerimaan, itu hal pertama. Hal kedua, adalah bagaimana mengalokasikan dana-dana itu untuk belanja yang produktif. Tadi menarik disampaikan baik oleh Ibu Menteri maupun oleh Pak Bambang bahwa pengalokasian ini luar biasa sudah sangat selektif, Cuma pertanyaan saya itu bagaimana



mengontrolnya gitu, bahwa anggaran yang diajukan oleh kementerian maupun badan-badan ini kan tidak dibawah Pak Menteri maupun Ibu Menteri. Dan kita lihat mekanisme yang selama ini berjalan juga tidak seperti yang diharapkan. Ada kadang-kadang kita lihat proyek itu terus, tahun berikutnya itu lagi itu lagi. Jadi tadi terobosan yang disampaikan oleh Bu Menteri, oleh Pak Bambang dan Pak Wimboh tadi itu ada beberapa sektor yang strategis itu kan sangat mendukung sebenarnya, tapi *how to control* gitu bagaimana ngontrol. Ini yang menurut saya lebih penting. Jadi kalau mengenai angka kita lihat tadi disebut Bank Dunia 5,2 kemudian kemarin itu kan saya sama Pak Bambang hadir juga di OECD. Ini Pak Ris itu kan 5,1 ya Pak Bambang ya. Kemudian juga kondisi yang disampaikan tadi tentunya kita juga harus optimis, artinya walaupun sekarang eksisting 5,07 kalau saya ngga salah, jadi hampir 5,01 mungkin PAN bergerak antara 5,2 sampai di 5,4 rans yang kita sampaikan. Nah tapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa alokasi belanja ini bagaimana caranya Bappenas maupun Menteri Keuangan mengontrol, karena di ujung daripada usulan-usulan anggaran ini kan sebagaimana pengalaman terdahulu bisa di cut atau dipotong oleh Bu Menteri. Tapi seperti apa ngontrolnya ini yang waktu itu saya pernah nanya dengan Pak Bambang termasuk juga alokasi dana daerah kalau Pak Bambang masih ingat bagaimana ngontrol yang mereka punya otonomi, itu memang sulit juga kan jawabannya. Nah inilah yang menjadi PR besar bagi kita semua. Kemudian kalau inflasi saya ikut Partai Golkar ini kami PAN Pak karena pimpinan kami bersebelahan itu Pak, sudah bisik-bisikan dua setengah sampai tiga setengah. Kemudian, eh sorry di dua sampai empat ya. Kemudian tingkat bunga, nah tingkat bunga kita mungkin dibawah itu 5 sama 5,2, sempit 5 sampai 5,2 karena posisi kita dipandang baik oleh pasar. Jadi mudah-mudahan dengan ini menurun juga beban cicilan hutang kita juga semakin baik, merefles cost-cost yang kita sudah terjadi sebelumnya yang memang agak tinggi. Kemudian nilai tukar kami sependapat dengan Demokrat 14.000 sampai 14.500, dengan Golkar lagi rupanya, iya Golkar lagi, iya berteman baik.

Baik terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

PKB, ngga ada ya, ya sudah langsung, PKS.

#### **F-PKS (H. REFRIZAL):**

**Terima kasih Pak Ketua dan Anggota komisi,  
Bapak Ibu Anggota Komisi XI yang saya hormati,  
Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Bappenas, Pak Gubernur Bank  
Indonesia, Kepala OJK, Kepala BPS dan seluruh jajaran yang saya  
hormati.**

*Assalamu.alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Telah panjang kita bahas dari hari Kamis yang lalu, sekarang kita mengusulkan untuk asumsi makro tahun 2020. PKS mengusulkan karena memang tidak pernah tercapai ya di atas 5,3 kami mengusulkan pertumbuhan

ekonominya 5,2 sampai 5,4 lebih realistis gitu ya. Dan juga inflasi kita lebih dekatkan dari 2 sampai 3. Kalau tadi PDI 2,5 ya lebih apa lebih pendek ya. Nilai tukar kita kami di PKS ingin rupiah kita berjaya Pak Gubernur ya kami ingin 13.500 sampai 14.000 supaya BI agak bekerja keras sedikit ya. Karena untuk apa inflasi kita rendah kalau nilai tukar kita juga rendah, nda ada artinya, ya kan. Suku bunga PKS lebih menekan sedikit 4,7 sampai 5,3. 4,7 sampai 5,3 Pak Ketua.

Saya kira itu yang perlu kita sampaikan ya. Terima kasih Pak Ketua, mudah-mudahan kita bisa eksekusi. Tadi ada juga kesamaan dengan PDIP ada ya, ada bawahnya nilai tukar juga. Nilai tukar PDI 14.000 sampai 14.300, kami agak lebih optimis sedikit rupiah kita harus lebih kuat Pak.

Terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Itu Pak Andreass dikasih tahu itu oleh PKS supaya bilangin ke Pak Jokowi PKS menyamai, sama PDI kita. PPP silakan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrohmanirrohim.*

*Assalamu.alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sesuai dengan yang kami sampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya saya membacakan pandangan ringkas fraksi kami secara keseluruhan. Kita ikut patokan yang sudah dirumuskan dan dipikir secara matang oleh pemerintah untuk semua point Pimpinan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,6, inflasinya 2,0 sampai 4,0, tingkat bunga SBN tiga bulannya 5,0 sampai 5,6 dan nilai tukar rupiah Cuma ini agak beda 14.000 sampai 14.500.

Terima kasih Pimpinan, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Dari Nasdem.

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Dengan merujuk pada penjelasan pemerintah juga implikasi daripada perkembangan global maka Fraksi Partai Nasdem pertumbuhannya 5,3 sampai 5,6. Kemudian inflasinya 2,0 sampai 2,4.

**KETUA RAPAT:**

Dua sampai empat. Dua koma nol sampai empat koma nol, ya. SBN, tingkat suku bunga, lima sampai lima koma enam. Kurs, ya baik Hanura. Ngga ada ya. Baik ini lima koma dua ada berapa ini, ada enam. Eanm fraksi lima koma dua, lima koma tiga dua fraksi, PPP dan Nasdem. Jadi bagaimana ini kita mau ini supaya bulat, hah lima koma dua ya, batas bawah ya, hah, iya bawahnya lima koma dua bisa, setuju ya. Tunggu atas dulu, batas atas lima koma empat, lima koma lima. Yang paling banyak lima koma empat. Hah, lima koma lima dua, lima koma enam dua, lima koma empat itu satu, dua, tiga, empat, empat. Lima koma empat lebih realistis, ya setuju ya lima koma empat ya. Inflasi,

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Nol koma lima itu saja pilihannya. Plus minusnya saja, duanya setuju semua.

**KETUA RAPAT:**

Atasnya berapa, atasnya berapa ini. Yang realistis yang realistis.

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Atasnya yang realistis tiga setengahlah.

**KETUA RAPAT:**

Tiga setengah atau empat?

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Sebenarnya kalau dua sampai empat itu seperti yang saya katakan tadi itu bahasa lain tiga plus minus satu.

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Terserahlah ini, karena rans dua sampai empat itu adalah rans yang sangat lebar sekali.

**KETUA RAPAT:**

Ngga ini kan baru pembicaraan pendahuluan, nanti pemerintah

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Oke kalau kerangka ngga apa-apalah 2 sampai 4.

**KETUA RAPAT:**

Sampai empat ya.

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

SBN, lima sampai, lima koma berapa, tiga ya. Lima sampai lima koma tiga ya. Kurs berapa kurs, empat belas ribu sampai empat belas ribu lima ratus. Wah itu win faal saja itu. Ya jadi dari DPR mengusulkan, pemerintah pertumbuhan ekonomi dari Komisi XI lima koma dua sampai lima koma empat. Inflasi dua sampai empat. SBN lima sampai lima koma tiga dan kurs empat belas ribu sampai empat belas ribu lima ratus. Silakan pemerintah. Oh lagi ini dulu ya, ya silakan.

**MENTERI KEUANGAN:**

Ya mungkin kalau boleh dari awal untuk grossnya karena tadi ada lima koma empat, lima koma lima, lima koma enam. Dan nampaknya distribusinya cukup kami tetap mengharapkan di lima koma lima saja maksimum Pak sesuai dengan Bank Indonesia juga batas atasnya. Jadi lima koma dua hingga lima koma lima.

**KETUA RAPAT:**

Jadi, ya silakan Pak Jon.

**F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Ya sepakat Bu, saya kira karena pembicaraan pendahuluan di batas bawah lima koma dua batas atas lima koma lima. Namun nanti kita bisa bahas lagi mungkin jangan terlalu optimis sekali ke atas ataupun. Kalau kita lihat trend nanti membaik, siapa tahu kondisi mungkin bisa seperti itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi?

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Sepakat lima koma dua sampai lima koma lima.

**KETUA RAPAT:**

Bisa setuju ya, lima koma dua lima koma lima ya. Bisa setuju ini Bu Menteri ya. Bu Menteri lima koma dua lima koma lima oke ya.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):**

Setuju Pak.

**(KETOK PALU SATU KALI)**

**KETUA RAPAT:**

Inflasi Bu.

**MENTERI KEUANGAN:**

Inflasi sesuai dengan yang kita.

**KETUA RAPAT:**

Saya ketok ya Bu ya.

**(KETOK PALU SATU KALI)**

SBN, SBN berapa itu, lima sampai lima koma enam ini lima sampai lima koma tiga.

**MENTERI KEUANGAN:**

Hari ini realisasi sampai dengan Mei lima koma delapan. Jadi kalau turun ke lima koma nol lima koma tiga mungkin terlalu jauh Pak. Kalau kita bisa yang batas atasnya dinaikan. Kalau disini ada dua yang menggunakan lima koma enam, Demokrat, PPP dan Nasdem kita ikut yang lima koma enam Pak, untuk batas atasnya.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana, lima sampai lima koma enam. Teman-teman?

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Kalau ini perlu kita bicarakan lebih lanjut karena sebetulnya gini, kan banyak hal yang sudah progresnya membaik, SNP juga sudah menaikkan *investment grade* gitu ya. Kemudian juga kita lihat ya lebih bagus dari negara-negara lain sudah in progres kemudian juga pendalaman pasar keuangan sudah tadi meningkat secara responsif. Jadi kita juga harus menunjukkan bahwa ini semua adalah ada hasil yang positif gitu. Itu pertimbangan kami, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain.

**F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Ya saya sependapat sama Pak Andreass Pak, karena supaya market juga melihat kita punya optimisme, artinya oh ini kita punya confidence level yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

**KETUA RAPAT:**

Ya Bu ini masih lima sampai lima koma tiga, SBN.

**MENTERI KEUANGAN:**

Kami setuju dengan optimisme dan saya rasa kalau kita bicara dengan market mekanisme tentu itu yang kita harapkan. Dan tahun ini kita juga menggunakan asumsi lima koma tiga walaupun realisasinya ternyata dengan dinamika global kita mendapatkan SBNnya ada di year to datenya lima koma delapan. Jadi hanya untuk menyampaikan saja kalau lima koma tiga yang kita gunakan tahun ini realisasinya sekitar nol koma lima point berbeda. Makanya kami tadi menyampaikan supaya lebih mendekati realitas. Artinya lima koma delapan turun ke lima koma enam atau dalam rans lima koma nol sehingga lima koma enam itu sudah merupakan progres yang cukup besar. Tentu dengan tadi yang disampaikan oleh Bank Indonesia dan dengan arah *federal reserve* yang diperkirakan mungkin akan paus dan menurun pada semester depan atau awal 2020 kita berharap akan memberikan dampak yang lebih menurun kepada kita.

Jadi sebetulnya buat kami di lima koma enam itu merupakan batas atas yang kami bayangkan, tapi nanti didalam nota keuangan mungkin ada di bawah itu. Jadi ransnya kalau antara lima koma nol dengan sampai dengan lima koma enam mungkin nanti didalam nota keuangan kita tidak akan mengambil rans yang paling atas, mungkin kita akan tetap ambil di bawah lima koma enam. Mungkin itu saja tapi supaya memberikan rans yang memungkinkan untuk kita membuat asesment sampai dengan bulan Agustus nanti Pimpinan. Atau lima koma lima kalau itu, karena saya menganggap dari lima koma delapan *year to date* untuk tahun ini masuk ke lima koma nol ke lima koma tiga itu agak cukup.

**KETUA RAPAT:**

Lima koma lima ini kan baru ini nanti pas nota keuangan akan coba disesuaikan yang lebih realistis karena itu kan masih bulan Agustus ya.

**MENTERI KEUANGAN:**

Dan kami masih akan menyampaikan laporan semseter ke Komisi XI untuk mendapatkan evaluasi lebih detail lagi perjalanan dari APBN 2019 sehingga nanti juga kita bisa recalibrate lagi dari kesepakatan ini.

**KETUA RAPAT:**

Jadi lima sampai lima setengah bisa ya, bisa ya.

**(KETOK PALU SATU KALI)**

Kursnya empat belas ribu sampai empat belas ribu lima ratus, setuju, pemerintah.

**MENTERI KEUANGAN:**

Setuju Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Setuju ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kita sudah membuat kesimpulan, saya ulangi pertumbuhan ekonomi ransnya lima koma dua sampai lima koma, berapa itu, lima koma lima. Inflasi

**F-PKS (H. REFRIZAL):**

Yang dari Gubernur BI Pak?

**KETUA RAPAT:**

Inflasinya dua sampai empat, terus SBNnya lima sampai lima setengah, dan kursnya empat belas ribu sampai empat belas ribu lima ratus.

**F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Pimpinan. Itu berarti target pembangunannya sama semua ya?

**KETUA RAPAT:**

Apanya, target pembangunan yang mana, yang dibawah, oh ya. Ikut pemerintah ya, target pembangunan ya, target pembangunan empat koma delapan sampai lima koma satu, terus tingkat kemiskinan delapan setengah sampai sembilan, gini ratio nol tiga tujuh lima sampai nol tiga delapan puluh dan IPM tujuh dua koma lima satu, bisa setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kita sudah memutuskan rans daripada asumsi makro ini dan selebihnya akan kita sampaikan ke Badan Anggaran untuk dibahas di Badan Anggaran. Besok kita dengan Departemen Keuangan untuk RKAKLnya ya.

Sekian dan terima kasih

**F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Pimpinan, Pimpinan sedikit Pimpinan. Ini sering terjadi kita dengan Badan Anggaran itu kan berbeda, dan saya mengusulkan kepada pemerintah kalau ada perbedaan itu kembali dulu ke Komisi XI jangan diputus disana. Nanti kalau sudah diputus disana nanti selalu terjadi simpang-siur lagi.

Terima kasih.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Saya memperkuat yang Pak Jon sampaikan, bahwa sebetulnya dalam surat kita agar disampaikan bahwa kalau ada perubahan agar dikembalikan dulu ke Komisi XI untuk dibicarakan lebih lanjut gitu, jadi tidak diputus disana. Didalam kesimpulannya sebaiknya ada demikian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya kalau yang lalu kan juga kita tetap pada pendirian kita meskipun di Badan Anggaran diputuskan lain ya kalau ada apa-apa ya masalahnya di Badan Anggaran dengan Pemerintah, kita tetap pada pendirian kita.

Sekian dan terima kasih,

*Wassalamu.alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Rapat saya tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.20 WIB)**

**Jakarta, 17 JUNI 2019**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

**ttd**

**Drs. Urip Soedjarwono  
NIP. 19620521 198203 1 001**



